



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X5 No. 4 - 9
Jakarta Selatan

277

LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN RI.
TAHUN 1996/1997

KANWIL DEPKES PROP JATIM

Diterima tanggal

Daftar

04 NOV 1997

Diteruskan ke

Daftar Ks. Bae

Nomor

6445

Paraf

Jakarta, 1997

KATA PENGANTAR

Laporan tahunan Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan tahun 1996/1997 memuat rangkuman hasil kegiatan pelaksanaan pengawasan oleh ITJEN Depkes serta Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah lainnya seperti BPKP dan BEPEKA. Khusus hasil pengawasan Inspektorat Jenderal disamping hasil pengawasan langsung juga disajikan pula informasi hasil pengawasan tidak langsung yang datanya diperoleh dari Laporan proyek maupun satuan kerja berupa laporan realisasi keuangan dan hambatan pelaksanaan kegiatan yang salah satu tembusannya dikirimkan ke Inspektorat Jenderal.

Pengawasan yang dilakukan oleh Itjen Depkes pada hakekatnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan program-program kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan. Sehubungan dengan itu hasil pengawasan dalam laporan ini secara khusus dibahas menurut kelompok program, disamping analisa per Unit Organisasi dan per provinsi untuk melengkapi.

Informasi penyebab penyimpangan dan jenis hambatan yang diperoleh melalui pengawasan langsung maupun melalui pengawasan tidak langsung, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaksana maupun pengendali program agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien. Penyelesaian tindak lanjut terhadap saran tindak yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan karena merupakan salah satu indikator keberhasilan pengawasan yakni adanya perbaikan atas penyimpangan.

Semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat.

 **INSPEKTUR JENDERAL**

Dr. Rusmono, SKM

DAFTAR ISI

	Halaman viii
INTISARI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. RUANG LINGKUP	1
BAB II : TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA KEBIJAKSANAAN PENGAWASAN	3
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
B. KEBIJAKSANAAN ,PENGAWASAN	3
1. Kebijakan Pengawasan Repelita VI	3
2. Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Depkes	4
BAB III : SASARAN DAN REALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
A. SASARAN DAN TARGET PENGAWASAN TAHUN 1996/1997	6
B. REALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI ITJEN DEPKES	7
1. Pencapaian Sasaran dan Target Pengawasan Inspektorat Jenderal Depkes.	7
2. Hasil Pengawasan Menurut Program.	8
3. Ikhtisar Hasil Pengawasan Menurut Unit Organisasi.	35
4. Ikhtisar Hasil Pengawasan Menurut Provinsi.	36
5. Pengawasan Masyarakat.	39
6. Pemeriksaan Khusus dan Post Audit.	42
7. Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP3P).	43
BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN MANAJERIAL (PENUNJANG)	44
A. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	44
B. PENGELOLAAN KEUANGAN	46
C. PENGELOLAAN PERLENGKAPAN	47
D. PELAKSANAAN KEGIATAN LAINNYA	48
BAB V : PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA	49
A. TANTANGAN.	49
B. KENDALA.	49
C. PELUANG.	50
BAB VI : PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel :	1 SASARAN KEGIATAN DAN TARGET PENGAWASAN ITJEN TAHUN 1996/1997	6
Tabel :	2 PENCAPAIAN TARGET DAN SASARAN PENGAWASAN ITJEN TAHUN 1996/1997	7
Tabel :	3 REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN ITJEN, BPKP DAN BEPEKA DALAM TAHUN 1996/1997 MENURUT PROGRAM	8
Tabel :	4 HASIL PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG PELAKSANAAN ANGGARAN DEPKES (RUTIN NON BELANJA PEGAWAI + PROYEK + BLN + OPRS) TAHUN 1996/1997	9
Tabel :	5 JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 1996/1997	11
Tabel :	6 JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 1996/1997	13
Tabel :	7 JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PELAYANAN RUJUKAN DAN RUMAH SAKIT TAHUN 1996/1997	15
Tabel :	8 JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR TAHUN 1996/1997	16
Tabel :	9 JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PERBAIKAN GIZI TAHUN 1996/1997	18
Tabel :	10 JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 1996/1997	19
Tabel :	11 JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PEMBINAAN PENGobatan TRADISIONAL TAHUN 1996/1997	20

Tabel :	12	JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH TAHUN 1996/1997	21
Tabel :	13	JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 1996/1997	23
Tabel :	14	JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN TAHUN 1996/1997	25
Tabel :	15	JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR NEGARA TAHUN 1996/1997	26
Tabel :	16	JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN ILMU TERAPAN TAHUN 1996/1997	28
Tabel :	17	JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN GENERASI MUDA TAHUN 1996/1997	28
Tabel :	18	JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA TAHUN 1996/1997	29
Tabel :	19	JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN TAHUN 1996/1997	30
Tabel :	20	JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN HUKUM KESEHATAN TAHUN 1996/1997	31
Tabel :	21	JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN 1996/1997	32
Tabel :	22	JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI APARATUR NEGARA TAHUN 1996/1997	34

Tabel :	23	JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENDAYAGUNAAN SISTEM DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHUN 1996/1997	34
Tabel :	24	REKAPITULASI TEMUAN, PENYEBAB PENYIMPANGAN, SARAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP DAN BEPEKA TAHUN 1996/1997 MENURUT UNIT ORGANISASI	35
Tabel :	25	REKAPITULASI KERUGIAN NEGARA DARI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LHP ITJEN, BPKP DAN BEPEKA TAHUN 1996/1997 MENURUT UNIT ORGANISASI	36
Tabel :	26	REKAPITULASI TEMUAN, PENYEBAB PENYIMPANGAN, SARAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP DAN BEPEKA TAHUN 1996/1997 MENURUT PROVINSI	37
Tabel :	27	REKAPITULASI KERUGIAN NEGARA DARI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LHP ITJEN, BPKP DAN BEPEKA TAHUN 1996/1997 MENURUT PROVINSI	38
Tabel :	28	PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000 YANG DITERIMA ITJEN DEPKES SELAMA TAHUN 1996/1997 MENURUT JENIS DAN TINGKAT KEBENARANNYA	39
Tabel :	29	PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000 YANG DITERIMA ITJEN DEPKES SELAMA TAHUN 1996/1997 MENURUT UNIT UTAMA DAN TINGKAT KEBENARANNYA	40
Tabel :	30	PENGADUAN MASYARAKAT LANGSUNG YANG DITERIMA ITJEN DEPKES SELAMA TAHUN 1996/1997 MENURUT JENIS DAN TINGKAT KEBENARANNYA	41
Tabel :	31	PENGADUAN MASYARAKAT LANGSUNG YANG DITERIMA ITJEN DEPKES SELAMA TAHUN 1996/1997 MENURUT JENIS DAN TINGKAT KEBENARANNYA	42
Tabel :	32	REKAPITULASI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS DAN POST AUDIT ITJEN DEPKES TAHUN 1996/1997 MENURUT JENIS TEMUAN	42
Tabel :	33	JUMLAH TENAGA/PEGAWAI ITJEN DEPKES DISUSUN MENURUT ESELON (Keadaan per 31 Maret 1997)	44

Tabel :	34	JUMLAH TENAGA/PEGAWAI ITJEN DEPKES DISUSUN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN (Keadaan per 31 Maret 1997)	45
Tabel :	35	REALISASI ANGGARAN RUTIN ITJEN DEPKES TAHUN 1996/1997	46
Tabel :	36	TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN ITJEN DEPKES TAHUN 1996/1997	46
Tabel :	37	SARANA DAN PRASARANA INSPEKTORAT JENDERAL DEPKES	47

DISPERPUSIP JATIM

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 REKAPITULASI JUMLAH LHP, TEMUAN, PENYEBAB, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPKP TAHUN ANGGARAN 1996/1997, MENURUT PROGRAM
- Lampiran 2 REKAPITULASI JUMLAH LHP, TEMUAN, PENYEBAB, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA TAHUN ANGGARAN 1996/1997, MENURUT PROGRAM
- Lampiran 3 REKAPITULASI JUMLAH LHP, TEMUAN, PENYEBAB, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEN DEPKES TAHUN ANGGARAN 1996/1997, MENURUT UNIT ORGANISASI
- Lampiran 4 REKAPITULASI JUMLAH LHP, TEMUAN, PENYEBAB, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPKP TAHUN ANGGARAN 1996/1997, MENURUT UNIT ORGANISASI
- Lampiran 5 REKAPITULASI JUMLAH LHP, TEMUAN, PENYEBAB, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA TAHUN ANGGARAN 1996/1997, MENURUT UNIT ORGANISASI
- Lampiran 6 REKAPITULASI JUMLAH TEMUAN, PENYEBAB PENYIMPANGAN DAN SARAN TINDAK HASIL PEMERIKSAAN ITJEN DEPKES TAHUN ANGGARAN 1996/1997, MENURUT PROVINSI
- Lampiran 7 REKAPITULASI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEN TAHUN 1996/1997, MENURUT PROVINSI
- Lampiran 8 REKAPITULASI JUMLAH LHP, TEMUAN, PENYEBAB, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPKP TAHUN ANGGARAN 1996/1997, MENURUT PROVINSI
- Lampiran 9 REKAPITULASI JUMLAH LHP, TEMUAN, PENYEBAB, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA TAHUN ANGGARAN 1996/1997, MENURUT PROVINSI
- Lampiran 10 REKAPITULASI KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN ITJEN DEPKES TAHUN ANGGARAN 1996/1997 MENURUT PROVINSI

- Lampiran 11 REKAPITULASI KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN ITJEN DEPKES DAN PENYELESAIANNYA TAHUN 1996/1997, MENURUT PROVINSI
- Lampiran 12 KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN BPKP TAHUN 1996/1997 DISUSUN MENURUT PROVINSI.
- Lampiran 13 KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA TAHUN 1996/1997 DISUSUN MENURUT PROVINSI.
- Lampiran 14 REKAPITULASI KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN ITJEN DEPKES DAN PENYELESAIANNYA TAHUN 1996/1997, MENURUT UNIT UTAMA
- Lampiran 15 KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA TAHUN 1996/1997 DISUSUN MENURUT UNIT UTAMA
- Lampiran 16 KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN BPKP TAHUN 1996/1997 DISUSUN MENURUT UNIT UTAMA
- Lampiran 17 KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN BPKP TAHUN 1996/1997 DISUSUN MENURUT PROGRAM
- Lampiran 18 KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA TAHUN 1996/1997 DISUSUN MENURUT PROGRAM
- Lampiran 19 HASIL PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG PELAKSANAAN ANGGARAN DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN 1996/1997
- Lampiran 20 HASIL PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG PELAKSANAAN ANGGARAN RUTIN DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN 1996/1997
- Lampiran 21 HASIL PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN 1996/1997
- Lampiran 22 HASIL PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN LUAR NEGERI DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN 1996/1997

INTISARI

Pada hakekatnya pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal adalah menilai pelaksanaan dan keberhasilan program-program di Departemen Kesehatan, sebagai penjabaran dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Kesehatan. Pelaksanaan pengawasan melalui pemeriksaan reguler dalam tahun 1996/1997 yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yaitu ITJEN, BPKP, BEPEKA, dihasilkan 722 LHP, 1.929 temuan dan 3.332 saran tindak, serta telah ditindak lanjuti sekitar 55%. Sedangkan hasil evaluasi melalui laporan yang masuk antara lain menunjukkan realisasi anggaran Departemen Kesehatan th. 1996/1997 sekitar 80,89% dari jumlah seluruh alokasi anggaran Departemen Kesehatan (Rutin dan Pembangunan termasuk BLN dan OPRS). Keseluruhannya menurut program dapat disarikan sebagai berikut :

a. Program Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Unsur pelaksana pada program ini terdiri dari 1 Satker dan 59 Proyek Pembangunan termasuk 11 proyek/bagian proyek yang mendapat bantuan luar negeri. Hasil pengawasan langsung oleh APFP selama tahun 1996/1997 sebanyak 8 Obyek atau sekitar 13,33 %, dari jumlah obyek yang ada. Dihasilkan 17 temuan dan 23 saran tindak, serta telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 15 saran tindak. Terdapat kerugian negara sebesar Rp1.380.000,- telah diselesaikan sebesar Rp 1.200.000,-(87,0%).

Temuan terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah: 1) kelemahan administrasi, 2) hambatan terhadap kelancaran proyek, dan 3) hambatan terhadap kelancaran tugas pokok.

Pengawasan tidak langsung (melalui laporan) terhadap program ini diperoleh hasil : Jumlah keseluruhan anggaran program ini yang meliputi anggaran rutin non belanja pegawai dan anggaran pembangunan sudah termasuk BLN adalah sebesar Rp 28.898.807.000,-. Anggaran terpantau Rp 28.898.807.000,- dengan realisasi Rp 18.667.757.890,- (64,60%).

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapatkan perhatian, yaitu: 1) Persetujuan revisi terlambat diterima, 2) Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari Pusat belum diterima, 3) Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan dan 4) Seksi PKM Dinas Kesehatan terlalu sibuk sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan

b. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Unsur pelaksana pada program ini terdiri dari 29 Satker dan 346 Proyek Pembangunan termasuk 111 proyek/bagian proyek berbantuan luar negeri. Hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh APFP selama tahun 1996/1997 sebanyak 83 Obyek atau sekitar 22,13 % dari jumlah obyek yang ada. Dihasilkan 241 temuan dan 458 saran tindak, serta telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 255 saran tindak, dan 43 saran dalam proses. Terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp. 93.021.719,23 dan telah diselesaikan sebesar Rp 10.705.850,00 (11,5%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah: 1) Kelemahan administrasi, 2) Pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku, dan 3) Penyimpangan pada ketentuan anggaran.

Pengawasan tidak langsung terhadap program ini diperoleh hasil : Jumlah keseluruhan anggaran program ini yang meliputi anggaran rutin non belanja pegawai dan anggaran pembangunan sudah termasuk BLN adalah Rp 248.222.611.000,-. Anggaran terpantau Rp 227.641.580.000,- dengan realisasi sebesar Rp 158.095.268.823,- (69,45%).

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapat perhatian adalah : 1) Tenaga pelaksana kegiatan kurang terampil, 2) Kurangnya koordinasi pada kegiatan penyemprotan malaria, sehingga target tidak tercapai, 3) Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan dan 4) Kesulitan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan karena perbedaan persepsi PUMK dengan pelaksana program.

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil-hasil pengawasan tersebut menunjukan adanya peningkatan dan perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program antara lain berupa, 1) Penyempurnaan ketatalaksanaan; 2) Penyempurnaan kelembagaan; dan 3) Tindakan administratif.

c. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit

Unsur pelaksana program ini terdiri dari 93 Satker dan 577 Proyek Pembangunan, termasuk 407 DIP OPRS dan 13 proyek/bagian proyek yang mendapat bantuan luar negeri. Hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh APFP Selama tahun 1996/1997 sebanyak 124 obyek atau sekitar 18,51 % dari jumlah obyek yang ada. Dihasilkan 346 temuan dan 559 saran tindak serta telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 250 saran tindak, dan 27 saran dalam proses. Terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 833.737.174,25 dan yang telah dapat diselesaikan sebesar Rp 147.732.170,24 (17,72%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah: 1) Kasus yang merugikan negara, 2) Pelanggaran prosedur dan tata kerja, dan 3) Kewajiban penyetoran kepada negara.

Pengawasan tidak langsung terhadap program ini diperoleh hasil: Jumlah keseluruhan anggaran program ini yang meliputi anggaran rutin non belanja pegawai dan anggaran pembangunan sudah termasuk BLN adalah Rp 380.219.589.000,- Anggaran terpantau Rp 372.467.193.000,- dengan realisasi Rp 325.537.656.407,- (87,40%).

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapatkan perhatian, yaitu: 1) usulan pencairan tanda bintang kepada Menteri Keuangan/ Bapenas tidak disetujui, sehingga ada beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan, 2) Dana untuk pengiriman peserta pelatihan AIDS tidak mencukupi, dan 3) Revisi DIP/PO terlambat diterima

Pelaksanaan tindak lanjut atas saran tindak pemeriksaan terdapat perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara, antara lain: 1) Penyempurnaan ketatalaksanaan; 2) Penyetoran uang negara; 3) Penyerahan barang/jasa kepada negara.

d. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Unsur pelaksana program ini terdiri dari 48 Satker dan 34 Proyek Pembangunan, termasuk 32 proyek/bagian proyek yang mendapatkan bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh APFP selama tahun 1996/1997 sebanyak 45 Obyek atau sekitar 54,88 % dari jumlah obyek yang ada. Dihasilkan 126 temuan dan 198 saran tindak, serta telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 118 saran tindak, dan 8 saran dalam proses. Terdapat kerugian negara sebesar Rp 33.047.973,19, yang telah dapat diselesaikan sebesar Rp 25.854.284,39 (78,23%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah: 1) Kelemahan administrasi, 2) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, 3) Kewajiban penyetoran kepada negara.

Pengawasan tidak langsung diperoleh hasil : Jumlah keseluruhan anggaran program ini yang meliputi anggaran rutin dan anggaran pembangunan sudah termasuk BLN adalah Rp 206.673.128.000,- terpantau Rp 203.992.003.000,- dengan realisasi Rp 175.676.941.851 (86,12%).

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapatkan perhatian, yaitu: 1) Kegiatan pengamatan penyakit tidak mencapai target karena tidak cukup dana. dan 2) Pelaksanaan kegiatan PIN lintas sektor di Dati II tidak optimal.

Pelaksanaan tindak lanjut atas saran tindak pemeriksaan terdapat perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara, antara lain : 1) Penyempurnaan ketatalaksanaan, 2) Penyetoran kepada negara , 3) Tindakan administratif.

e. Program Perbaikan Gizi

Unsur pelaksana pada program ini terdiri dari 29 proyek pembangunan, termasuk 6 proyek/bagian proyek yang mendapat bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh APFP selama tahun 1996/1997 sebanyak 18 obyek atau sekitar 62,07 % dari jumlah obyek yang ada. Dihasilkan 38 temuan dan 57 saran tindak serta telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 45 saran tindak, 4 saran dalam proses. Terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 5.925.545,- dan telah diselesaikan keseluruhanya (100%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah: 1) Kelemahan administrasi, 2) Pelanggaran terhadap perundang-undangan, 3) Hambatan terhadap kelancaran proyek.

Pengawasan tidak langsung diperoleh hasil : Jumlah keseluruhan anggaran program ini yang meliputi anggaran proyek termasuk BLN adalah Rp 20.343.040.000,- dan terpantau keseluruhannya dengan realisasi Rp 18.644.607.289,- (91,65%).

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapatkan perhatian, yaitu: 1) Beberapa program kegiatan gizi tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena tingginya faktor kesulitan., 2) Kegiatan survey pemetaan anemia Gizi Bumil dan anak Balita tidak bisa dilaksanakan karena harus menunggu persetujuan (NOL) dari sumber donor, 3) Kelemahan dalam unsur perencanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mencapai target.

f. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Unsur pelaksana pada program terdiri dari 29 Satker dan 63 Proyek Pembangunan, termasuk 25 proyek/bagian proyek yang mendapat bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh APFP selama tahun 1996/1997 sebanyak 38 Obyek atau sekitar 41,30 %, dari jumlah obyek yang ada. Dihasilkan 78 temuan, 131 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 88 saran tindak, serta 1 saran masih dalam proses. Terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 9.987.696,49 yang telah diselesaikan sebesar Rp 6.086.521,49 (60,94%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah: 1) Penyimpangan dari ketentuan anggaran, 2) Kelemahan administrasi, 3) Hambatan terhadap kelancaran proyek.

Pengawasan tidak langsung terhadap program ini diperoleh hasil : Jumlah keseluruhan anggaran program ini yang meliputi anggaran rutin dan anggaran pembangunan sudah termasuk BLN adalah Rp 46.306.154.000,- Anggaran terpantau Rp 46.014.100.000,- dengan realisasi Rp 28.619.961.957,- (62,20%)

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapatkan perhatian, yaitu: 1) Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan, karena petugas yang bersangkutan melaksanakan tugas lain, 2) Petunjuk teknis dari Pusat terlambat diterima, 3) Belum sinkronnya rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan di Dati II.

Pelaksanaan tindak lanjut atas saran tindak pemeriksaan terdapat perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara, antara lain : 1) Penyempurnaan ketatalaksanaan, 2) Penyetoran uang kepada negara, 3) Tindakan administratif.

g. Program Pembinaan Pengobatan Tradisional

Unsur pelaksana pada program ini meliputi 6 obyek proyek pembangunan. Dalam tahun 1996/1997 pada program ini tidak ada pemeriksaan dari aparat APFP.

Pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan dapat dipaparkan sebagai berikut: Jumlah anggaran program ini adalah Rp 1.280.641.000,- dengan realisasi Rp 1.274.392.650,- (99,51%)

Berdasarkan laporan yang masuk tidak tercatat kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan daya serap anggaran.

h. Program Pengawasan dan Penyediaan Air Bersih

Unsur pelaksana pada program ini terdiri 28 Proyek Pembangunan, termasuk 1 proyek yang mendapat bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh APFP selama tahun 1996/1997 sebanyak 4 obyek atau sekitar 14,29% dari jumlah obyek yang ada. Dihasilkan 7 temuan, 7 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 6 saran tindak, serta 1 saran masih belum ditindaklanjuti. Terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 1.882.000,- dan telah diselesaikan keseluruhannya (100%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah: 1) Kelemahan administrasi, 2) Kasus yang merugikan negara.

Pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut diperoleh hasil: Jumlah keseluruhan anggaran program ini meliputi anggaran proyek dan BLN adalah Rp 11.360.438.000,- telah terpantau keseluruhannya dengan realisasi Rp 9.401.637.304,- (82,76).

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapatkan perhatian, yaitu: 1) Adanya beberapa kegiatan yang dibintangi, sehingga target tidak tercapai, 2) Pertanggungjawaban SPJ dari Dati II, terlambat diterima, 3) Beberapa kegiatan pokok program PAB tidak tercapai, karena kegiatan penunjang tidak dilaksanakan.

Pelaksanaan tindak lanjut atas saran tindak pemeriksaan terdapat perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara, antara lain :1) Penyempurnaan ketatalaksanaan dan 2) Pelaksanaan Waskat

i. Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Pemukiman

Unsur pelaksana pada program ini terdiri dari 3 Satker dan 32 Proyek Pembangunan, termasuk 31 proyek/bagian proyek yang mendapat bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh APFP selama tahun 1996/1997 sebanyak 15 obyek atau sekitar 42,86 % dari jumlah obyek yang ada. Dihasilkan 36 temuan, 64 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 51 saran tindak serta 5 saran dalam

proses. Terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 17.989.705,- dan telah diselesaikan sebesar Rp 13.887.105,- (77,21%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah: 1) Kasus yang merugikan negara, 2) Kelemahan administrasi, 3) Pelanggaran terhadap prosedur dan tatakerja.

Pengawasan tidak langsung terhadap program ini diperoleh hasil: Jumlah keseluruhan anggaran program ini yang meliputi anggaran rutin dan anggaran pembangunan sudah termasuk BLN adalah sebesar Rp 28.351.646.000,- yang terpantau Rp 28.116.563.000,- realisasinya Rp 20.100.281.505,- (71,49%).

Pelaksanaan tindak lanjut atas saran tindak pemeriksaan terdapat perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara, antara lain: 1) Penyempurnaan ketatalaksanaan, 2) Penyetoran uang kepada negara.

Berdasarkan laporan yang masuk tidak tercatat kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan daya serap anggaran.

j. Program Pendidikan Kedinasan

Unsur pelaksana pada program ini terdiri dari 178 Satker dan 165 Proyek Pembangunan, termasuk 33 proyek/bagian proyek yang mendapatkan bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh APFP selama tahun 1996/1997 sebanyak 144 obyek atau sekitar 41,98%, dengan rincian 86 obyek diperiksa oleh Itjen Depkes dan 58 obyek oleh BPKP. Dihasilkan 417 temuan, 792 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 312 saran tindak, serta 57 saran dalam proses. Terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 281.363.998,- yang telah diselesaikan sebesar Rp 95.721.219,- (34,02%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah: 1) Kelemahan administrasi, 2) Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok dan 3) Kewajiban penyetoran kepada negara.

Pengawasan tidak langsung terhadap program ini diperoleh hasil jumlah keseluruhan anggaran program ini yang terdiri anggaran rutin dan anggaran pembangunan sudah termasuk BLN adalah Rp 106.098.786.000, yang terpantau Rp 101.956.357.000,- dengan realisasi Rp 87.895.791.240, (86,20%).

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapatkan perhatian, yaitu: 1) Adanya peserta program bidan yang keluar sebelum menyelesaikan pendidikan sehingga target tidak tercapai, 2) Penerimaan siswa bidan tidak mencapai target dan 3) Biaya hidup kurang karena lemahnya perencanaan

Pelaksanaan tindak lanjut atas saran tindak pemeriksaan terdapat perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara, antara lain :1) Penyempurnaan ketatalaksanaan, 2) Penyetoran uang kepada negara, 3) Tindakan administratif.

k. Program Diklat Aparatur Negara

Unsur pelaksanaan pada program ini terdiri dari 31 Satker dan 31 Proyek Pembangunan, termasuk 14 proyek/bagian proyek yang mendapatkan bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang telah dilakukan oleh APFP selama tahun 1996/1997 sebanyak 18 obyek atau sekitar 29,03 % dari jumlah obyek yang ada. Dihasilkan 23 temuan, 31 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 6 saran tindak, serta 1 saran dalam proses. Terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 17.135.773,- dan telah diselesaikan sebesar Rp 7.064.035,- (41,22%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah: 1) Kasus yang merugikan negara, 2) Kelemahan administrasi, 3) Hambatan terhadap kelancaran proyek.

Pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut diperoleh hasil : Jumlah anggaran keseluruhan program ini yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran proyek sudah termasuk BLN adalah Rp 17.337.713.000, anggaran terpantau Rp 17.253.805.000 realisasi mencapai Rp 15.255.472.149,- (88,42%).

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapatkan perhatian, yaitu: 1) Pelatihan Quality Assurance belum dapat direalisasikan, 2) Realisasi fisik tidak tercapai, karena adanya dana yang diblokir oleh DJA, dan 3) Persetujuan revisi tidak keluar, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan tindak lanjut atas saran tindak pemeriksaan terdapat perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara, antara lain : 1) Penyetoran uang kepada negara, 2) Penyempurnaan ketatalaksanaan.

l. Program Pengkajian dan Penelitian Ilmu Terapan

Unsur pelaksana pada program ini terdiri dari 9 Satker dan 8 Proyek Pembangunan. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh APFP selama tahun 1996/1997 sebanyak 3 obyek atau sekitar 17,65 % dari obyek yang ada. Dihasilkan 11 temuan, 16 saran tindak dan seluruhnya telah tuntas ditindaklanjuti. Terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 16.321.000,- dan belum ada penyelesaiannya.

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah: 1) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, 2) Kasus yang merugikan negara.

Pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut diperoleh hasil Jumlah keseluruhan anggaran program ini yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan adalah sebesar Rp 9.175.780.000,- terpantau keseluruhannya, dengan realisasi Rp 8.934.451.888,- (97,37%).

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapatkan perhatian, yaitu pertanggungjawaban SPJ dari Dati II terlambat diterima.

m. Program Peningkatan Generasi Muda

Unsur pelaksana program ini hanya 1 obyek Proyek Pembangunan. Dalam tahun 1996/1997 belum ada pengawasan langsung yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP).

Pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk dapat dipaparkan bahwa jumlah anggaran program ini adalah Rp 508.883.000,- terpantau keseluruhannya dengan realisasi mencapai Rp 507.490.700,- (99,73%).

n. Program Peningkatan Peranan Wanita

Unsur pelaksana program ini meliputi 28 obyek Proyek Pembangunan. Terhadap program ini pengawasan langsung belum dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP).

Pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut diketahui bahwa : Jumlah anggaran program ini adalah Rp 996.827.000,- terpantau seluruhnya, dengan realisasi Rp 961.272.895,- (96,43%).

o. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Unsur pelaksana pada program ini terdiri dari 1 Satker dan 34 Proyek Pembangunan, termasuk 10 proyek/bagian proyek yang mendapatkan bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh APFP selama tahun 1996/1997 sebanyak 5 obyek atau sekitar 14,29% dari jumlah obyek yang ada. Dihasilkan 6 temuan, 15 saran tindak, yang telah ditindak lanjuti 13 saran tindak.

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah: 1) Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok, dan 2) Hambatan terhadap kelancaran proyek.

Pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut diperoleh hasil : Jumlah keseluruhan anggaran program ini yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk BLN adalah Rp 10.011.640.000,- yang terpantau Rp 9.629.033.000 dengan realisasi Rp 4.761.824.773,- (49,45%)

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapatkan perhatian, yaitu: 1) Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, 2) Penambahan sambungan saluran telepon (SST) belum direalisasikan.

Pelaksanaan tindak lanjut atas saran tindak pemeriksaan terdapat perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara, adalah : - Penyempurnaan ketatalaksanaan .

p. Program Pengembangan Hukum Kesehatan

Unsur pelaksana pada program ini hanya di 1 obyek Proyek Pembangunan. Dalam tahun 1996/1997 terhadap program ini pengawasan langsung belum dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP).

Pengawasan tidak langsung melalui laporan diketahui jumlah anggaran untuk program ini adalah Rp 553.118.000,- dengan realisasi mencapai Rp 510.021.755,- (92,21%).

q. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Unsur pelaksana program ini terdiri dari 18 obyek Proyek Pembangunan. Termasuk 1 Proyek/Bagpro yang mendapatkan Bantuan Luar Negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh APFP selama tahun 1996/1997 sebanyak 13 obyek atau sekitar 72,22% dari obyek yang ada. Dihasilkan 45 temuan dengan 66 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 51 saran tindak serta 1 saran dalam proses. Terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 60.039.306,40, dan telah diselesaikan sebesar Rp 2.508.936,40 (4,18%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah: 1) Kelemahan administrasi, 2) Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok, dan 3) Pelanggaran prosedur dan tatakerja.

Pengawasan tidak langsung melalui laporan diketahui bahwa, Jumlah anggaran program ini adalah Rp 4.069.364.000,- terpantau keseluruhan nya dengan realisasi mencapai Rp 3.999.147.998,- (98,27%).

Pelaksanaan tindak lanjut atas saran tindak pemeriksaan terdapat perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara, antara lain :1) Penyempurnaan ketatalaksanaan, 2) Tindakan administratif dan 3) Penyempurnaan kelembagaan.

r. Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara

Unsur pelaksana pada program ini terdiri dari 585 obyek Satker dan 33 Proyek Pembangunan termasuk 9 proyek/bagian proyek yang mendapatkan bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh APFP selama tahun 1996/1997 sebanyak 204 obyek atau sekitar 33,01% dari jumlah obyek yang ada. Dihasilkan 538 temuan, dengan 914 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 444 saran tindak serta 43 saran dalam proses. Terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 117.081.694,17 dan telah diselesaikan Rp 28.784.231,53 (24,58%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah: 1) Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok, 2) Kelemahan administrasi, dan 3) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan tidak langsung melalui laporan yang masuk diketahui bahwa jumlah anggaran program ini adalah Rp 33.932.364.000,- terpantau Rp 32.273.960.000,- realisasi Rp 23.709.649.418,- (73,46%).

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapatkan perhatian, yaitu: 1) Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena ada tanda bintang, dan 2) Dana pendamping untuk pengadaan komputer tidak tersedia

Pelaksanaan tindak lanjut atas saran tindak pemeriksaan terdapat perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara, antara lain : 1) Penyempurnaan ketatalaksanaan, 2) Tindakan administratif, dan 3) Penyetoran uang kepada negara.

s. Program Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan

Unsur pelaksana program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Pengawasan tidak langsung melalui laporan yang masuk diketahui bahwa jumlah anggaran program ini (Rutin diluar belanja pegawai) sebesar Rp 3.568.661.000,- dengan realisasi Rp.3.494.020.833,- (97,91%).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen, merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan pengawasan diintegrasikan dalam sistem pengawasan yang terpadu dan ditempatkannya peranan pengawasan sebagai unsur mutlak dalam manajemen pemerintah dan pembangunan nasional.

Laporan tahunan ini dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) tugas pokok dan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal Depkes selama tahun 1996/1997 kepada pimpinan Departemen Kesehatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Depkes adalah menyajikan hasil evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan selama tahun 1996/1997 beserta seluruh aspek pendukungnya, sebagai informasi dan bahan pengambilan keputusan Pimpinan Departemen Kesehatan.

C. RUANG LINGKUP

Laporan tahunan ini memuat gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Depkes serta evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan di Departemen Kesehatan yang dilakukan oleh BPKP maupun BEPEKA.

Materi laporan bersumber dari hasil pengawasan fungsional, yaitu baik pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung meliputi pemeriksaan, pengujian, pengecekan dan pengusutan sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui evaluasi terhadap materi laporan yang diterima dan dikumpulkan Inspektorat Jenderal baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Fungsional.

Sebagai bahan pengawasan tidak langsung pada laporan ini bersumber dari laporan Keadaan Kredit Anggaran dan Laporan Keadaan Kas Rutin/Pembangunan, laporan triwulan kemajuan proyek termasuk didalamnya pelaksanaan bantuan luar negeri (BLN) dan DIPP OPRS serta informasi lainnya yang dihimpun dalam pemutahiran data serentak pelaksanaan anggaran Departemen Kesehatan tahun 1996/1997, yang dilakukan Itjen Depkes pada bulan April dan Mei 1997.

DISPERPUSIP JATIM

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA KEBIJAKSANAAN PENGAWASAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Inspektorat Jenderal Depkes berdasar SK Menkes Nomor 558/Menkes/SK/1984 adalah melaksanakan pengawasan di lingkungan Departemen Kesehatan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Departemen agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, Inspektorat Jenderal Depkes melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap setiap unsur/instansi di lingkungan Departemen Kesehatan yang dipandang perlu meliputi administrasi umum, administrasi keuangan, hasil fisik dari pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan lain-lain.
- b. Pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unsur/instansi di lingkungan Departemen Kesehatan atas petunjuk Menteri.
- c. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh unsur instansi di lingkungan Departemen Kesehatan.

B. KEBIJAKSANAAN PENGAWASAN

1. Kebijakanaksanaan Pengawasan Repelita VI.

Kebijaksanaan pelaksanaan pengawasan selama Repelita VI tertuang dalam surat Menko Eku Wasbang Nomor S-08/M.Eku/1994, tanggal 11 Februari 1994, menyatakan bahwa:

- a. Kebijakanaksanaan pemantapan sistem pengawasan keuangan negara dan pembangunan guna mencapai efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan, yang diarahkan terwujudnya keterpaduan dan konsistensi pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

- b. Kegiatan pengawasan diperlukan untuk memperbaiki pengendalian pemerintah dan jalannya pembangunan pada umumnya, mencegah dan menindak penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.
- c. Pengawasan hendaknya ikut menelaah keadaan secara tepat, untuk dilakukan tindakan secara dini agar dapat meraih peluang untuk mengatasi masalah-masalah yang baru muncul.
- d. Pengawasan hendaknya dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pengelola program, baik untuk tahun anggaran berjalan maupun untuk tahun mendatang.
- e. Melaksanakan pemeriksaan komprehensif yang menyeluruh dalam jangka waktu tertentu maksimal tidak ada satu obyekpun yang tidak diperiksa dalam Pelita VI.
- f. Mengutamakan ditingkatkannya efisiensi kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

2. Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Depkes

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Depkes mengacu kepada pokok-pokok kebijakan pemerintah dibidang pengawasan 1996/1997 sebagai bagian integral dari manajemen untuk menciptakan aparatur kesehatan yang bersih, berwibawa, berdayaguna dan berhasilguna serta mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk lebih memantapkan secara terpadu dan konsisten dalam mencapai efisiensi penyelenggaraan negara dan pembangunan diperlukan langkah-langkah kebijakan pengawasan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemeriksaan yang berorientasi pada penilaian terhadap pelaksanaan program Depkes baik Rutin maupun Pembangunan meliputi:
 - 1) Pemeriksaan komprehensif, termasuk didalamnya pemeriksaan aspek perencanaan dan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)
 - 2) Pemeriksaan aspek strategis (pelayanan)
 - 3) Pemeriksaan Kemudian (Post Audit)
 - 4) Pemeriksaan proyek-proyek besar yang sudah selesai
 - 5) Pemeriksaan serentak
 - 6) Pemeriksaan khusus.

- b. Meningkatkan pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APFP termasuk penyelesaian pengaduan masyarakat melalui Tromol Pos 5000 dan penyelesaian kerugian negara.
- c. Mendorong pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah baik pada tingkat Departemen, Ditjen serta eselon di bawahnya sebagai pertanggungjawaban kedinasan kepada atasan langsung.
- d. Pemantapan pedoman-pedoman pengawasan.
- e. Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga pengawas fungsional dengan menggunakan metodologi pemeriksaan program.
- f. Meningkatkan koordinasi pengawasan dengan APFP lainnya.
- g. Mendorong peningkatan pengawasan dan pengendalian di tingkat Kanwil Depkes.
- h. Membina ketatalaksanaan kegiatan Itjen mencakup pelaksanaan tugas pokok maupun kegiatan penunjang.

BAB III

SASARAN DAN REALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. SASARAN DAN TARGET PENGAWASAN TAHUN 1996/1997

Rencana Kerja dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Depkes tahun 1996/1997 dapat dikelompokkan menurut kegiatan pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung (melalui laporan) dan kegiatan penunjang, ikhtisarnya sebagai berikut :

Tabel : 1

SASARAN KEGIATAN DAN TARGET PENGAWASAN ITJEN TH. 1996/1997

SASARAN KEGIATAN/TOLOK UKUR	TARGET	KETERANGAN
I PENGAWASAN LANGSUNG 1. Pemeriksaan Reguler 2. Pemeriksaan Khusus 3. Post Audit	282 OP 32 Kasus 16 OP	OP = Obyek Pemeriksaan
II PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG 1. Analisa Data "Kemajuan Proyek" 2. Analisa Data (Desk Audit) LKKA 3. Pemutakhiran Data Serentak Hasil Pelaksanaan Anggaran	4 Triwulan 12 bulan 27 Propinsi	
III KEGIATAN MANAJERIAL (PENUNJANG) 1. Pembinaan Pengawasan 2. Pemantauan Tindak Lanjut LHP 3. Pemutakhiran Data Pengawasan dengan Unit Terkait 4. Analisa Data Hasil Pengawasan 5. Penyusunan Pedoman Pengawasan 6. Pemantauan LP2P 7. Pengelolaan Sumber Daya Manusia: a. Administrasi Kepegawaian b. Diklat Pengawasan c. Kalakarya Pengawasan 8. Pengelolaan Keuangan 9. Pengelolaan Perlengkapan	35 Trip 8 Trip 4 Triwulan 4 Triwulan 1 Paket 1 Paket 100 % 1 Paket 1 kali 100 % 100 %	

B. REALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI ITJEN DEPKES

Dalam bab ini diuraikan tentang pelaksanaan pengawasan langsung meliputi pemeriksaan reguler yang dilakukan Itjen Depkes, BPKP dan BEPEKA secara keseluruhan. Hasil pengawasan dikelompokkan menurut program, provinsi dan unit organisasi tetapi analisa dilakukan terutama pada hasil pengawasan menurut program. Disajikan pula pengelompokan hasil pengawasan menurut unit organisasi dan provinsi dimaksudkan untuk melengkapi analisa menurut program. Penilaian terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program selain bersumber dari hasil-hasil pemeriksaan langsung juga bersumber dari hasil-hasil pelaksanaan pengawasan tidak langsung melalui analisa laporan yang diterima Inspektorat Jenderal Depkes.

1. Pencapaian Sasaran dan Target Pengawasan Inspektorat Jenderal

Pada umumnya sasaran dan target pengawasan langsung maupun tidak langsung yang dilakukan Inspektorat Jenderal dalam tahun 1996/1997 mencapai 100%, kecuali pada kegiatan Post Audit hanya mencapai 44%, karena ada penyesuaian rencana. Keadaan yang lebih jelas terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2 :

PENCAPAIAN TARGET DAN SASARAN PENGAWASAN ITJEN DEPKES TAHUN 1996/1997

SASARAN	TARGET	REALISASI	%
I. PENGAWASAN LANGSUNG			
1. Pemeriksaan Reguler	282 OP	282 OP	100
2. Pemeriksaan Khusus	PM	21 kasus	100
3. Post Audit	16 OP	7 OP	44
II. PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG			
1. Analisa Data "Kemajuan Proyek"	4 triwulan	4 Triwulan	100
2. Analisa Data (Desk Audit) LKKA	12 bulan	12 bulan	100
3. Pemutakhiran Data Serentak Hasil Pelaksanaan Anggaran	27 Propinsi	27 Propinsi	100

2. Hasil Pengawasan Menurut Program

Ikhtisar hasil pemeriksaan tertera pada tabel berikut :

Tabel 3 :

REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN ITJEN, BPKP DAN BEPEKA DALAM TAHUN 1996/1997 MENURUT PROGRAM

	PROGRAM	LHP	TEMUAN	SARAN TINDAK	TINDAK LANJUT	
					JUMLAH	%
I	PROGRAM POKOK	316	846	1427	855	59,9
	1. PENYULUHAN KES. MASYARAKAT	8	17	23	15	65,2
	2. PENINGKATAN YAN KESMAS.	83	241	459	299	65,1
	3. RUJUKAN & RS	124	346	559	277	49,6
	4. P 2 M	45	126	198	126	63,6
	5. PERBAIKAN GIZI	18	38	57	49	86,0
	6. P O M	38	78	131	89	67,9
	7. PEMBINAAN OBT. TRADISIONAL	-	-	-	-	-
II	PROGRAM PENUNJANG	461	1185	2027	1015	50,1
	8. PPAB	4	7	7	6	85,7
	9. PKLP	15	36	64	56	87,5
	10. PENDIDIKAN KEDINASAN	145	426	803	380	47,3
	11. PENDIDIKAN & LATIHAN PEG.	18	23	31	7	22,6
	12. PENELITIAN & PENGEMBANGAN	3	11	16	0	0,0
	13. PEMBINAAN PEMUDA	-	-	-	-	-
	14. PERANAN WANITA	-	-	-	-	-
	15. SISTEM INFORMASI KES.	5	6	15	13	86,7
	16. PENGEMBANGAN HUKUM KES	-	-	-	-	-
	17. SARANA & PRASARANA	12	36	55	41	75,6
	18. EFISIENSI APARATUR NEGARA	204	538	914	487	53,3
	19. PENGEMB. SISTEM & LAKWAS	-	-	-	-	-
	20. BUMN	55	102	122	25	20,5
	JUMLAH	777	2031	3454	1870	55,4

Tabel yang memuat lebih rinci hasil pengawasan melalui pemeriksaan ITJEN, BPKP, BEPEKA menurut program tertera pada lampiran 1, 2 dan 3.

Sedangkan hasil pengawasan tidak langsung melalui laporan pelaksanaan anggaran yang diterima dan dihimpun Inspektorat Jenderal tertera pada tabel berikut :

Tabel 4 :

HASIL PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG
PELAKSANAAN ANGGARAN DEPKES (RUTIN NON BEL.PEG+PROYEK+BLN+OPRS)
TAHUN 1996/1997

(Dalam Jutaan Rupiah)

PROGRAM	OBYEK/SUB OBYEK		PELAKSANAAN AGGRAN DEPKES			
	JUMLAH	TERPANTAU	ALOKASI	TERPANTAU	REALISASI	%
I. PROG. POKOK	1.499	1.359	931.943,97	900.637,36	726.489,79	80,66
1. P K M	71	71	28.898,81	28.898,81	18.667,76	64,60
2. P P K M	486	465	248.222,61	227.641,58	158.068,27	69,45
3. RUJUKAN & RS	670	565	380.219,59	372.467,19	325.537,66	87,40
4. P 2 M	114	101	206.673,13	203.992,00	175.676,94	86,12
5. PERBAIKAN GIZI	35	35	20.343,04	20.343,04	18.644,61	91,65
6. P O M	117	116	46.306,15	46.014,10	28.619,96	62,20
7. OBAT TRADISIONAL	6	6	1.280,64	1.280,64	1.274,39	99,51
II. PROG. PENUNJANG	1.286	1.128	225.965,22	219.462,79	179.531,06	81,80
8. P P A B	29	29	11.360,44	11.360,44	9.401,64	82,76
9. P K L P	66	65	28.351,65	28.116,56	20.100,28	71,49
10. PENDIDIKAN KEDINASAN	376	352	106.098,79	101.956,36	87.957,84	86,27
11. LATIHAN PEGAWAI	76	75	17.337,71	17.253,81	15.255,47	88,42
12. LITBANG	17	17	9.175,78	9.175,78	8.934,45	97,37
13. PEMBINAAN PEMUDA	1	1	508,88	508,88	507,49	99,73
14. PERANAN WANITA	28	28	996,83	996,83	961,27	96,43
15. S I K	45	43	10.011,64	9.629,03	4.761,82	49,45
16. HUKUM KESEHATAN	1	1	553,12	553,12	510,02	92,21
17. PRASARANA	19	19	4.069,36	4.069,36	3.999,15	98,27
18. EFISIENSI	627	497	33.932,37	32.273,96	23.709,65	73,46
19. SISLAKWAS	1	1	3.568,66	3.568,66	3.494,02	97,91
JUMLAH	2.785	2.487	1.157.909,19	1.120.100,15	906.020,86	80,89

Tabel yang lebih rinci menurut masing-masing anggaran, yaitu rutin, proyek Pembangunan, OPRS maupun Bantuan Luar Negeri tertera pada lampiran 4,5,6 dan 7

Selanjutnya tinjauan hasil pengawasan pada masing-masing program adalah sebagai berikut :

a. Program Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Program ini meliputi 60 obyek, terdiri dari 1 Satker dan 59 Proyek Pembangunan, termasuk 11 proyek/bagian proyek yang mendapat bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) meliputi Itjen Depkes, BPKP dan BEPEKA selama tahun 1996/1997 sebanyak 8 Obyek atau sekitar 13,3 %, dengan rincian 1 Obyek diperiksa oleh Itjen Depkes, 7 obyek oleh BPKP. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh APFP tersebut dihasilkan 17 temuan, 23 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 15 saran tindak, dan 8 saran masih belum ditindaklanjuti. Berdasarkan pemeriksaan tersebut terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp1.380.000,- telah diselesaikan sebesar Rp 1.200.000,-(87,0%).

temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah:

- 1) Kelemahan administrasi (6 temuan)
- 2) Hambatan terhadap kelancaran proyek (4 temuan)
- 3) Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok (3 temuan)

Penyebab penyimpangan yang utama berdasarkan kelompok penyebab pengawasan adalah sbb:

- 1) Kelemahan dalam prosedur (5 sebab)
- 2) Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan (4 sebab)
- 3) Kelemahan dalam pengawasan intern (4 sebab)

Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pengendali program, yaitu:

- 1) Tidak adanya harga standar yang dimiliki oleh Panitia pembelian sebelum mengadakan pembelian barang-barang.
- 2) Tidak dilaksanakannya pertemuan lintas program dan kursus media komunikasi secara tepat waktu.
- 3) Pengadaan barang cetakan untuk penyuluhan bidang kesehatan tidak maksimal dilaksanakan.

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara.

Hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes meliputi Laporan Bulanan (LKKAR/LKKAP) dan laporan Triwulanan Proyek ditambah dengan hasil

pengumpulan data serentak pelaksanaan anggaran Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 5 :

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Satuan Kerja (Tanpa Bel Peg)	1	1	655.730.000	655.730.000	655.219.697	99,92
2	Proyek/BP	59	59	12.654.340.000	12.654.340.000	11.397.603.679	90,07
3	BLN (Sub obyek)	11	11	15.588.737.000	15.588.737.000	6.614.934.513	42,43
	JUMLAH	71	71	28.898.807.000	28.898.807.000	18.667.757.889	64,60

Jumlah anggaran program ini Rp 28.898.807.000,- terpantau seluruhnya dengan realisasi Rp 18.667.757.889,- (64,60%)

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

- 1) Persetujuan revisi terlambat diterima
- 2) Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari Pusat belum diterima
- 3) Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan
- 4) Seksi PKM Dinas Kesehatan terlalu sibuk sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan

b. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Program ini meliputi 375 obyek, terdiri dari 29 Satker dan 346 Proyek Pembangunan termasuk 111 proyek/bagian proyek berbantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) meliputi Itjen Depkes, BPKP dan BEPEKA selama tahun 1996/1997 sebanyak 83 Obyek atau sekitar 22,13%, dengan rincian 57 Obyek diperiksa oleh Itjen Depkes, 23 Obyek oleh BPKP dan 3 Obyek oleh BEPEKA. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh APFP tersebut dihasilkan 241 temuan, 459 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 256 saran tindak, 43 saran dalam proses serta 160 saran masih belum ditindaklanjuti. Berdasarkan pemeriksaan tersebut terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 93.021.719,23 dan yang telah dapat diselesaikan sebesar Rp 10.844.203,- (11,7%).

pengumpulan data serentak pelaksanaan anggaran Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 5 :

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Satuan Kerja (Tanpa Bel Peg)	1	1	655.730.000	655.730.000	655.219.697	99,92
2	Proyek/BP	59	59	12.654.340.000	12.654.340.000	11.397.803.679	90,07
3	BLN (Sub obyek)	11	11	15.588.737.000	15.588.737.000	6.614.934.513	42,43
	JUMLAH	71	71	28.898.807.000	28.898.807.000	18.667.757.889	64,60

Jumlah anggaran program ini Rp 28.898.807.000,- terpantau seluruhnya dengan realisasi Rp 18.667.757.889,- (64,60%)

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

- 1) Persetujuan revisi terlambat diterima
- 2) Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari Pusat belum diterima
- 3) Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan
- 4) Seksi PKM Dinas Kesehatan terlalu sibuk sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan

b. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Program ini meliputi 375 obyek, terdiri dari 29 Satker dan 346 Proyek Pembangunan termasuk 111 proyek/bagian proyek berbantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) meliputi Itjen Depkes, BPKP dan BEPEKA selama tahun 1996/1997 sebanyak 83 Obyek atau sekitar 22,13%, dengan rincian 57 Obyek diperiksa oleh Itjen Depkes, 23 Obyek oleh BPKP dan 3 Obyek oleh BEPEKA. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh APFP tersebut dihasilkan 241 temuan, 459 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 256 saran tindak, 43 saran dalam proses serta 160 saran masih belum ditindaklanjuti. Berdasarkan pemeriksaan tersebut terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 93.021.719,23 dan yang telah dapat diselesaikan sebesar Rp 10.844.203,- (11,7%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah:

- 1) Kelemahan administrasi (37 temuan)
- 2) Pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku (28 temuan).
- 3) Penyimpangan pada ketentuan anggaran (24 temuan)

Penyebab penyimpangan yang utama berdasarkan kelompok penyebab pengawasan adalah sbb:

- 1) Kelemahan dalam pembinaan personil (63 sebab)
- 2) Kelemahan rencana (50 sebab)
- 3) Penyebab ekstern hambatan kelancaran proyek (53 sebab)

Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pengendali program, yaitu:

- 1) Kegiatan pemberantasan vektor penyakit malaria dan Demam Berdarah Dengue belum dilaksanakan secara optimal.
- 2) Cakupan pemberian vitamin A, tablet Fe, imunisasi pada bufas, bumil dan balita masih rendah.
- 3) Rendahnya pencapaian pelaksanaan bimbingan teknis dan pelaporan hasil kegiatan sehingga menyulitkan pemantauan dan pengendalian program.
- 4) Tidak dilaksanakannya pengujian silang sputum dalam penentuan penderita penyakit Tb. Paru dan pengobatan penderita Tb. Paru yang drop out cukup tinggi.

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek, meliputi:

- 1) Penyempurnaan ketatalaksanaan (197 peristiwa)
- 2) Penyempurnaan kelembagaan (23 peristiwa)
- 3) Tindakan administratif (15 peristiwa)

Hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 6 :

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Satuan Kerja (tanpa bel. peg)	29	28	6.442.793.000	6.442.793.000	6.262.780.991	97,21
2	Proyek/BP	346	338	114.014.773.000	111.068.015.000	101.316.400.773	91,22
3	BLN (sub obyek)	111	99	127.765.045.000	110.130.772.000	50.489.298.334	45,84
	JUMLAH	486	465	248.222.611.000	227.641.580.000	158.068.480.098	69,45

Jumlah anggaran program ini adalah Rp 248.222.611.000,- yang terpantau Rp 227.641.580.000,- dengan realisasi Rp 158.095.268.823,- (69,45%)

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

- 1) Tenaga pelaksana kegiatan kurang terampil
- 2) Kurangnya koordinasi pada kegiatan penyemprotan malaria, sehingga target tidak tercapai
- 3) Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan
- 4) Kesulitan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan, karena perbedaan persepsi PUMK dengan pelaksana program.

c. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit

Program ini meliputi 657 obyek, terdiri dari 93 Satker dan 157 Proyek Pembangunan, termasuk di dalamnya 407 DIP OPRS dan 13 proyek/bagian proyek yang mendapat bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) selama tahun 1996/1997 sebanyak 124 obyek atau sekitar 18,51 %, dengan rincian 27 obyek diperiksa oleh Itjen Depkes, 97 obyek oleh BPKP. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh APFP tersebut dihasilkan 346 temuan, 559 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 250 saran tindak, 27 saran dalam proses serta 282 saran masih belum ditindaklanjuti. Berdasarkan pemeriksaan tersebut terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 833.737.174,25 dan yang telah diselesaikan sebesar Rp 147.732.170,24 (17,72%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah:

- 1) Kasus yang merugikan negara (62 temuan)
- 2) Pelanggaran prosedur dan tata kerja (38 temuan)
- 3) Kewajiban penyetoran kepada negara (36 temuan)

Penyebab penyimpangan yang utama berdasarkan kelompok penyebab pengawasan adalah sbb:

- 1) Kelemahan dalam pembinaan personil (68 sebab)
- 2) Kelemahan dalam rencana (52 sebab)
- 3) Kelemahan dalam pengawasan intern (50 sebab)

Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pengendali program, yaitu:

- 1) Peralatan medik dan non medik belum diuji fungsi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Harga obat yang tidak terjangkau oleh penderita.
- 3) Spesifikasi fisik pengadaan barang tidak sesuai dengan kontrak.
- 4) Banyaknya piutang rumah sakit yang tidak dapat ditagih.

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial, antara lain:

- 1) Penyempurnaan ketatalaksanaan (171 peristiwa)
- 2) Penyetoran uang negara (45 peristiwa)
- 3) Penyerahan barang/jasa kepada negara (13 peristiwa)

Sementara itu hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes, dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 7:

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PELAYANAN RUJUKAN & RUMAH SAKIT
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Satuan Kerja (tanpa bel.peg)	93	93	118.558.977.000	118.558.977.000	115.547.954.260	97,46
2	Proyek/BP	157	157	141.525.697.000	141.525.697.000	136.147.232.589	96,20
3	BLN (sub obyek)	13	13	61.378.896.000	61.378.896.000	23.081.040.581	37,60
4	OPRS	407	302	58.756.019.000	51.003.623.000	50.761.428.977	59,53
	JUMLAH	670	565	380.219.589.000	372.467.193.000	325.537.656.407	87,40

Jumlah anggaran program ini adalah Rp. 380.219.589.000,- terpantau Rp 372.467.193.000,- dengan realisasi Rp 325.537.656.407,- (87,40%)

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Usulan pencairan tanda bintang kepada Menteri Keuangan/ Bappenas tidak disetujui, sehingga ada beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
- 2) Dana untuk pengiriman peserta pelatihan AIDS tidak mencukupi
- 3) Revisi DIP/PO terlambat diterima

d. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Program ini meliputi 82 obyek, terdiri dari 48 Satker dan 34 Proyek Pembangunan, termasuk 32 proyek/bagian proyek yang mendapatkan bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) selama tahun 1996/1997 sebanyak 45 Obyek atau sekitar 54,88%, dengan rincian 17 obyek diperiksa oleh Itjen Depkes, 25 obyek oleh BPKP dan 3 obyek oleh BEPEKA. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh APFP tersebut dihasilkan 126 temuan, 198 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 118 saran tindak, 8 saran dalam proses serta 72 saran masih belum ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 33.047.973,19, telah dapat diselesaikan sebesar Rp 25.854.284,39 (78,23%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah:

- 1) Kelemahan administrasi (27 temuan)
- 2) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (26 temuan)
- 3) Kewajiban penyeteroran kepada negara (11 temuan)

Penyebab penyimpangan yang utama berdasarkan kelompok penyebab pengawasan adalah sbb:

- 1) Kelemahan dalam pembinaan personil (35 sebab)
- 2) Kelemahan dalam rencana (26 sebab)
- 3) Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan (15 sebab)

Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pengendali program, yaitu:

- 1) Belum tertibnya pencatatan suhu freezer oleh petugas pengelola vaksin di tingkat provinsi dan kabupaten.
- 2) Pengelola program belum membuat laporan tahunan sebagai evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial, antara lain :

- 1) Penyempurnaan ketatalaksanaan (87 peristiwa)
- 2) Tindakan administratif (15 peristiwa)
- 3) Penyeteroran kepada negara (12 peristiwa)

Dari hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 8 :

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PEMEBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Satuan Kerja (tanpa bel. peg)	48	38	10.764.138.000	10.099.922.000	9.170.266.527	90,80
2	Proyek/BP	34	34	123.400.918.000	123.400.918.000	118.708.535.681	96,20
3	BLN (sub obyek)	32	29	72.508.072.000	70.491.163.000	47.798.139.643	67,81
	JUMLAH	114	101	206.673.128.000	203.992.003.000	175.676.941.851	86,12

Jumlah anggaran program ini adalah Rp 206.673.128.000,- terpantau Rp 203.992.003.000,- dengan realisasi Rp 175.676.941.851 (86,12%).

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Kegiatan pengamatan penyakit tidak mencapai target karena tidak cukup dana.
- 2) Pelaksanaan kegiatan PIN lintas sektor di Dati II tidak optimal.

e. Program Perbaikan Gizi

Program ini terdiri dari 29 proyek pembangunan termasuk 6 proyek/bagian proyek yang mendapat bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) selama tahun 1996/1997 sebanyak 18 obyek atau sekitar 62,07% dengan rincian 6 obyek diperiksa oleh Itjen Depkes, 12 obyek oleh BPKP. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh APFP tersebut dihasilkan 38 temuan, 57 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 45 saran tindak, 4 saran dalam proses serta 8 saran masih belum ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 5.952.545,- telah dapat diselesaikan keseluruhanya (100%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah:

- 1) Kelemahan administrasi (6 temuan)
- 2) Pelanggaran terhadap perundang-undangan (5 temuan)
- 3) Hambatan terhadap kelancaran proyek (4 temuan)

Penyebab penyimpangan yang utama berdasarkan kelompok penyebab pengawasan adalah sbb:

- 1) Kelemahan dalam rencana (12 sebab)
- 2) Kelemahan dalam kebijakan (9 sebab)
- 3) Kelemahan dalam prosedur (5 sebab)

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara, antara lain :

- 1) Penyempurnaan ketatalaksanaan (38 peristiwa)
- 2) Penyetoran uang kepada negara (6 peristiwa)

Sementara itu hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 9 :

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PERBAIKAN GIZI
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Proyek/BP	29	29	18.127.665.000	18.127.665.000	17.459.836.286	96,32
2	BLN (sub obyek)	6	6	2.215.375.000	2.215.375.000	1.184.771.003	53,48
	JUMLAH	35	35	20.343.040.000	20.343.040.000	18.644.607.289	91,65

Jumlah anggaran program ini adalah Rp 20.343.040.000,- dan terpantau keseluruannya dengan realisasi Rp 18.644.607.289,- (91,65%).

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Beberapa program kegiatan gizi tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena tingginya faktor kesulitan.
- 2) Kegiatan survey pemetaan anemia Gizi Bumil dan anak Balita tidak bisa dilaksanakan karena harus menunggu persetujuan (NOL) dari sumber donor.
- 3) Kelemahan dalam unsur perencanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mencapai target.

f. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini meliputi 92 obyek, terdiri dari 29 Satker dan 63 Proyek Pembangunan, termasuk 25 proyek/bagian proyek yang mendapat bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) selama tahun 1996/1997 sebanyak 38 Obyek atau sekitar 41,30%, dengan rincian 7 obyek diperiksa oleh Itjen Depkes, 31 obyek oleh BPKP. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh APFP tersebut dihasilkan 78 temuan, 131 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 88 saran tindak, 1 saran dalam proses serta 42 saran masih belum ditindaklanjuti. Berdasarkan pemeriksaan tersebut terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 9.987.696,49 dan telah diselesaikan sebesar Rp 6.086.521,49 (60,94%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah:

- 1) Penyimpangan dari ketentuan anggaran (13 temuan)
- 2) Kelemahan administrasi (9 temuan)
- 3) Hambatan terhadap kelancaran proyek (4 temuan)

Penyebab penyimpangan yang utama berdasarkan kelompok penyebab pengawasan adalah sbb:

- 1) Kelemahan dalam pengawasan intern (21 sebab)
- 2) Kelemahan dalam kebijaksanaan (16 sebab)
- 3) Kelemahan dalam pembinaan personil (15 sebab)

Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pengendali program, yaitu:

- a. Terdapat sarana pelayanan obat yang menjual obat daftar G tanpa resep dokter.
- b. Tidak ditindaklanjutnya pengujian sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang dirujuk ke Pusat

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial, antara lain :

- 1) Penyempurnaan ketatalaksanaan (68 peristiwa)
- 2) Penyetoran uang kepada negara (10 peristiwa)
- 3) Tindakan administratif (8 peristiwa)

Hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 10 :

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Satuan Kerja (tanpa bel peg)	29	28	8.168.613.000	7.876.559.000	7.442.506.152	94,49
2	Proyek/BP	63	63	14.594.924.000	14.594.924.000	14.120.890.235	96,75
3	BLN (sub obyek)	25	25	23.542.617.000	23.542.617.000	7.056.565.570	29,97
	JUMLAH	117	116	46.306.154.000	46.014.100.000	28.619.961.957	62,20

Jumlah anggaran program ini adalah Rp 46.306.154.000,- yang terpantau Rp 46.014.100.000,- dengan realisasi Rp 28.619.961.957,- (62,20%)

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan, karena petugas yang bersangkutan melaksanakan tugas lain.
- 2) Petunjuk teknis dari Pusat terlambat diterima.
- 3) Belum sinkronnya rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan di Dati II.

g. Program Pembinaan Pengobatan Tradisional

Program ini meliputi 6 obyek proyek pembangunan. Dalam tahun 1996/1997 pada program ini tidak ada pemeriksaan dari aparat APFP.

Hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 11 :

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PEMBINAAN PENGOBATAN TRADISIONAL
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYE K	TERPANTA U	SELURUH	TERPANTAU		
2	Proyek/BP	6	6	1.280.641.000	1.280.641.000	1.274.392.650	99,51
	JUMLAH	6	6	1.280.641.000	1.280.641.000	1.274.392.650	99,51

Jumlah anggaran program ini adalah Rp 1.280.641.000,- dengan realisasi Rp 1.274.392.650,- (99,51%)

h. Program Pengawasan dan Penyediaan Air Bersih

Program ini terdiri dari 28 Proyek Pembangunan termasuk 1 proyek yang mendapat bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) selama tahun 1996/1997 sebanyak 4 obyek atau sekitar 14,29% oleh BPKP.

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh APFP tersebut dihasilkan 7 temuan, 7 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 6 saran tindak, serta 1 saran masih belum ditindaklanjuti. Berdasarkan pemeriksaan tersebut terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 1.882.000,- telah diselesaikan keseluruhannya (100%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah:

- 1) Kelemahan administrasi (4 temuan)
- 2) Kasus yang merugikan negara (2 temuan)

Penyebab penyimpangan yang utama berdasarkan kelompok penyebab pengawasan adalah :

- Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan (3 sebab)

Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pengendali program, yaitu rendahnya pencapaian target pemeriksaan sampel air, sehingga kurang mendapat gambaran mengenai kualitas air bersih bagi masyarakat.

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial, antara lain :

- 1) Penyempurnaan ketatalaksanaan (5 peristiwa)
- 2) Waskat

Hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 12 :

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Satuan Kerja (tanpa bel peg)	0	0	0	0	0	0
2	Proyek/BP	28	28	7.218.438.000	7.218.438.000	6.737.532.344	93,34
3	BLN (sub obyek)	1	1	4.142.000.000	4.142.000.000	2.664.104.960	64,32
	JUMLAH	29	29	11.360.438.000	11.360.438.000	9.401.637.304	82,76

Jumlah anggaran program ini adalah Rp 11.360.438.000,- terpantau keseluruhannya dengan realisasi Rp 9.401.637.304,- (82,76).

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Adanya beberapa kegiatan yang dibintangi, sehingga target tidak tercapai.
- 2) Pertanggungjawaban SPJ dari Dati II, terlambat diterima.
- 3) Beberapa kegiatan pokok program PAB tidak tercapai, karena kegiatan penunjang tidak dilaksanakan.

i. Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Pemukiman

Program ini meliputi 34 obyek, terdiri dari 3 Satker dan 32 Proyek Pembangunan, termasuk 31 proyek/bagian proyek yang mendapatkan bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) selama tahun 1996/1997 sebanyak 15 obyek atau sekitar 42,86 %, dengan rincian 7 obyek diperiksa oleh Itjen Depkes, dan 8 obyek oleh BPKP. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh APFP tersebut dihasilkan 36 temuan, 64 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 51 saran tindak, 5 saran dalam proses serta 8 saran masih belum ditindaklanjuti. Berdasarkan pemeriksaan tersebut terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 17.989.705,- telah diselesaikan sebesar Rp 13.887.105,- (77,20%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah:

- 1) Kasus yang merugikan negara (8 temuan)
- 2) Kelemahan administrasi (8 temuan)
- 3) Pelanggaran terhadap prosedur dan tatakerja (4 temuan)

Penyebab penyimpangan yang utama berdasarkan kelompok penyebab pengawasan adalah sbb:

- 1) Kelemahan dalam pembinaan personil (11 sebab)
- 2) Kelemahan dalam kebijaksanaan (9 sebab)
- 3) Kelemahan dalam perencanaan (6 sebab)

Selain itu terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pengendali program, yaitu hasil pemeriksaan sampel belum diupayakan dikembalikan ke Dati II sebagai pihak pengirim.

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara, antara lain :

- 1) Penyempurnaan ketatalaksanaan (42 peristiwa)
- 2) Penyetoran uang kepada negara (7 peristiwa)

Hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 13 :

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PEMUKIMAN
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Satuan Kerja (tanpa bel.peg)	3	3	2.113.886.000	2.113.886.000	2.090.225.121	98,88
2	Proyek/BP	32	32	5.296.858.000	5.296.858.000	4.999.274.810	94,38
3	BLN (sub obyek)	31	30	20.940.902.000	20.705.819.000	13.010.781.574	62,84
	JUMLAH	66	65	28.351.646.000	28.116.563.000	20.100.281.505	71,49

Jumlah anggaran program ini adalah Rp 28.351.646.000,- yang terpantau Rp 28.116.563.000,- realisasi Rp 20.100.281.505,- (71,49%).

Berdasarkan laporan yang masuk tidak tercatat adanya kendala yang dihadapi

j. **Program Pendidikan Kedinasan**

Program ini meliputi 343 obyek, terdiri dari 178 Satker dan 165 Proyek Pembangunan, termasuk 33 proyek/bagian proyek yang mendapatkan bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) selama tahun 1996/1997 sebanyak 145 obyek atau sekitar 41,98%, dengan rincian 86 obyek diperiksa oleh Itjen Depkes dan 58 obyek oleh BPKP. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh APFP tersebut dihasilkan 426 temuan, 803 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 322 saran tindak, 58 saran dalam proses serta 423 saran masih belum ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat nilai

kerugian negara sebesar Rp 282.623.351,- telah diselesaikan sebesar Rp 96.793.219,- (34,24%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah:

- 1) Kelemahan administrasi (79 temuan)
- 2) Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok (44 temuan)
- 3) Kewajiban penyetoran kepada negara (47 temuan)

Penyebab penyimpangan yang utama berdasarkan kelompok penyebab pengawasan adalah sbb:

- 1) Kelemahan dalam pembinaan personil (149 sebab)
- 2) Penyebab ekstern hambatan pelaksanaan tupoksi (85 sebab)
- 3) Kelemahan pengawasan intern (56 sebab).

Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pengendali program, yaitu:

- 1) Kurangnya jam tatap muka dalam kelas, sehingga materi yang diterima siswa kurang.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar antara lain gedung, ruang belajar, alat laboratorium, buku-buku pelajaran dan gedung perpustakaan.
- 3) Ratio guru dengan siswa belum sesuai dengan ketentuan.
- 4) Terdapat mata ajaran dalam jadwal tidak sesuai dengan pedoman kurikulum yang berlaku.
- 5) Banyak siswa bidan yang mengundurkan diri/diberhentikan, mengakibatkan target lulusan siswa bidan tidak tercapai.

Dari pelaksanaan tindak lanjut atas saran tindak pemeriksaan terdapat perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara, antara lain :

- 1) Penyempurnaan ketatalaksanaan (242 peristiwa)
- 2) Penyetoran uang kepada negara (43 peristiwa)
- 3) Tindakan administratif (8 peristiwa)

Hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 14 :

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Satuan Kerja (tanpa bel.peg)	178	165	44.733.107.000	42.218.172.000	40.538.687.211	96,02
2	Proyek/BP	165	159	42.332.817.000	41.690.127.000	38.411.056.775	92,13
3	BLN (sub obyek)	33	28	19.032.862.000	18.048.058.000	8.946.047.254	49,57
	JUMLAH	376	352	106.098.786.000	101.956.357.000	87.895.791.240	86,21

Jumlah anggaran program ini adalah Rp 106.098.786.000,- yang terpantau Rp 101.956.357.000,- realisasi Rp 87.895.791.240,- (86,21%).

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Adanya peserta program bidan yang keluar sebelum menyelesaikan pendidikan sehingga target tidak tercapai.
- 2) Penerimaan siswa bidan tidak mencapai target
- 3) Biaya hidup kurang karena lemahnya perencanaan

k. Program Diklat Aparatur Negara

Program ini meliputi 62 obyek, terdiri dari 31 Satker dan 31 Proyek Pembangunan, termasuk 14 proyek/bagian proyek yang mendapatkan bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) selama tahun 1996/1997 sebanyak 18 obyek atau sekitar 29,03%, dengan rincian 2 obyek diperiksa oleh Itjen Depkes dan 16 obyek oleh BPKP. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh APFP tersebut dihasilkan 23 temuan, 31 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 6 saran tindak, 1 saran dalam proses serta 24 saran masih belum ditindaklanjuti. Berdasarkan pemeriksaan tersebut terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 17.135.773,- telah diselesaikan sebesar Rp 7.064.035,- (41,22%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah:

- 1) Kasus yang merugikan negara (8 temuan)
- 2) Kelemahan administrasi (4 kasus)
- 3) Hambatan terhadap kelancaran proyek (2 temuan)

Penyebab penyimpangan yang utama berdasarkan kelompok penyebab pengawasan adalah sbb:

- 1) Kelemahan dalam perencanaan (5 sebab)
- 2) Kelemahan dalam prosedur (5 sebab)
- 3) Penyebab ekstern hambatan tupoksi (5 sebab)

Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pengendali program, yaitu:

- 1) Pengadaan bahan penunjang pendidikan dan pelatihan tidak sesuai dengan SPK/kontrak.
- 2) Tim Pembina tidak melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
- 3) Terlambatnya peningkatan sumber daya manusia.

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara, antara lain :

- 1) Penyetoran uang kepada negara (3 peristiwa)
- 2) Penyempurnaan ketatalaksanaan (2 peristiwa)

Hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 15 :

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENDIDIKAN & PELATIHAN APARTUR NEGARA
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Satuan Kerja (tanpa bel.peg)	31	30	5.538.464.000	5.454.556.000	4.913.704.407	90,08
2	Proyek/BP	31	31	7.677.449.000	7.677.449.000	7.298.810.581	95,07
3	BLN (sub obyek)	14	14	4.121.800.000	4.121.800.000	3.042.957.161	73,83
	JUMLAH	76	75	17.337.713.000	17.253.805.000	15.255.472.149	88,42

Jumlah anggaran program ini adalah Rp 17.337.713.000 yang terpantau Rp 17.253.805.000 realisasi Rp 15.255.472.149,- (88,42%).

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Pelatihan Quality Assurance belum dapat direalisasikan.
- 2) Realisasi fisik tidak tercapai, karena adanya dana yang diblokir oleh DJA.
- 3) Persetujuan revisi tidak keluar, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

I. Program Pengkajian dan Penelitian Ilmu Terapan

Program ini meliputi 17 obyek yang terdiri dari 9 Satker dan 8 Proyek Pembangunan. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) selama tahun 1996/1997 sebanyak 3 obyek atau sekitar 17,65 %, dengan rincian 2 obyek diperiksa oleh Itjen Depkes, dan 1 obyek oleh BPKP. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh APFP tersebut dihasilkan 11 temuan, 16 saran tindak dan seluruhnya belum ditindaklanjuti. Terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 16.821.000,- dan belum ada penyelesaian.

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah:

- 1) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (3 temuan)
- 2) Kasus yang merugikan negara (2 temuan)

Penyebab penyimpangan yang utama berdasarkan kelompok penyebab pengawasan adalah sbb:

- 1) Kelemahan prosedur (3 sebab)
- 2) Kelemahan pembinaan personil (3 sebab)
- 3) Kelemahan perencanaan (2 sebab)

Disamping itu, dari hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 16 :

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN ILMU TERAPAN
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Satuan Kerja (tanpa bel peg)	9	9	3.951.534.000	3.951.534.000	3.872.671.287	98,00
2	Proyek/BP	8	8	5.224.246.000	5.224.246.000	5.061.780.601	96,89
	JUMLAH	17	17	9.175.780.000	9.175.780.000	8.934.451.888	97,37

Jumlah anggaran program ini adalah Rp 9.175.780.000,- terpantau seluruhnya, dengan realisasi Rp 8.934.451.888,- (97,37%).

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapat perhatian, yaitu pertanggungjawaban SPJ dari Dati II terlambat diterima.

m. Program Peningkatan Generasi Muda

Program ini hanya 1 obyek Proyek Pembangunan. Dalam tahun 1996/1997 belum ada pengawasan langsung yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP).

Dari hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 17 :

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN GENERASI MUDA
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Proyek/BP	1	1	508.883.000	508.883.000	507.490.700	99,73
	JUMLAH	1	1	508.883.000	508.883.000	507.490.700	99,73

Jumlah anggaran program ini adalah Rp 508.883.000,- terpantau keseluruhannya dengan realisasi Rp 507.490.700,- (99,73%).

Berdasarkan laporan yang masuk tidak tercatat adanya kendala yang dihadapi.

n. Program Peningkatan Peranan Wanita

Program ini meliputi 28 obyek Proyek Pembangunan. Terhadap program ini pengawasan langsung belum dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP).

Hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 18 :

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
2	Proyek/BP	28	28	996.827.000	996.827.000	961.272.895	96,43
	JUMLAH	28	28	996.827.000	996.827.000	961.272.895	96,43

Jumlah anggaran program ini adalah Rp 996.827.000,- terpantau seluruhnya, dengan realisasi Rp 961.272.895,- (96,43%).

Berdasarkan laporan yang masuk tidak tercatat adanya kendala yang dihadapi.

o. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Program ini meliputi 35 obyek, terdiri dari 1 Satker dan 34 Proyek Pembangunan, termasuk 10 proyek/bagian proyek yang mendapatkan bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) selama tahun 1996/1997 sebanyak 5 obyek atau sekitar 14,29%, hanya diperiksa oleh Itjen Depkes. Berdasarkan pemeriksaan tersebut dihasilkan 6 temuan, 15 saran tindak, yang telah ditindak lanjuti 13 saran tindak sedang 2 saran belum.

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah:

- 1) Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok (2 temuan)
- 2) Hambatan terhadap kelancaran proyek (1 temuan)

Penyebab penyimpangan yang utama berdasarkan kelompok penyebab pengawasan adalah sbb:

- 1) Kelemahan dalam rencana (4 sebab)
- 2) Kelemahan dalam waskat (2 sebab)
- 3) Penyebab ekstern hambatan kelancaran proyek (2 sebab)

Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pengendali program, yaitu pembuatan buku profil kesehatan terlambat sehingga penyebarluasan informasi mengenai gambaran situasi kesehatan tidak tepat waktu.

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara, yaitu :

- Penyempurnaan ketatalaksanaan (13 peristiwa)

Hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 19 :

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Satuan Kerja (tanpa bel.peg)	1	1	584.464.000	584.464.000	528.989.000	90,50
2	Proyek/BP	34	33	2.372.452.000	2.303.374.000	2.193.011.038	95,21
3	BLN (sub obyek)	10	9	7.054.724.000	6.741.195.000	2.039.824.735	30,26
	JUMLAH	45	43	10.011.640.000	9.629.033.000	4.761.824.773	49,45

Jumlah anggaran program ini adalah Rp 10.011.640.000,- yang terpantau Rp 9.629.033.000 realisasi Rp 4.761.824.773,- (49,45%)

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 2) Penambahan sambungan saluran telepon (SST) belum direalisasikan.

p. Program Pengembangan Hukum Kesehatan

Pada program ini hanya terdapat 1 obyek Proyek Pembangunan. Dalam tahun 1996/1997 terhadap program ini belum dilakukan pengawasan langsung oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP).

Hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 20 :

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENGEMBANGAN HUKUM KESEHATAN
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Proyek/BP	1	1	553.118.000	553.118.000	510.021.755	92,21
	JUMLAH	1	1	553.118.000	553.118.000	510.021.755	92,21

Jumlah anggaran program ini adalah Rp 553.118.000,- seluruhnya terpantau dengan realisasi Rp 510.021.755,- (92,21%).

q. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Program ini terdiri dari 18 obyek Proyek Pembangunan termasuk 1 proyek/bagian proyek berbantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) selama tahun 1996/1997 sebanyak 12 obyek atau sekitar 72,22 %, dengan rincian 10 obyek oleh BPKP dan 2 obyek oleh BEPEKA. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh APFP tersebut dihasilkan 36 temuan, 55 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 39 saran tindak, 2 saran dalam proses serta 14 saran masih belum ditindaklanjuti. Berdasarkan pemeriksaan tersebut terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 58.967.306,40, telah diselesaikan sebesar Rp 1.436.936,40 (2,44%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah:

- 1) Kelemahan administrasi (5 temuan)
- 2) Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok (5 temuan)
- 3) Pelanggaran prosedur dan tatakerja (4 temuan)

Penyebab penyimpangan yang utama berdasarkan kelompok penyebab pengawasan adalah sbb:

- 1) Kelemahan dalam rencana (9 sebab)
- 2) Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan (9 sebab)
- 3) Kelemahan pengawasan intern (8 sebab)

Hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara, antara lain :

- 1) Penyempurnaan ketatalaksanaan (27 peristiwa)
- 2) Tindakan administratif (5 peristiwa)
- 3) Penyempurnaan kelembagaan (4 peristiwa)

Disamping itu, dari hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 21:

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Proyek/BP	18	18	3.697.446.000	3.697.446.000	3.628.779.062	98,14
2	BLN	1	1	371.928.000	371.918.000	370.368.936	99,58
	(sub obyek)						
	JUMLAH	19	19	4.069.364.000	4.069.364.000	3.999.147.998	98,27

Jumlah anggaran program ini adalah Rp 4.069.364.000,- seluruhnya terpantau dengan realisasi Rp 3.999.147.998,- (98,27%).

r. Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara

Program ini meliputi 618 obyek, terdiri dari 585 satker dan 33 Proyek Pembangunan, termasuk 9 proyek/bagian proyek yang mendapatkan bantuan luar negeri. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) selama tahun 1996/1997

sebanyak 204 obyek atau sekitar 33,01%, dengan rincian 65 obyek diperiksa oleh Itjen Depkes, dan 139 obyek oleh BPKP. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh APFP tersebut dihasilkan 538 temuan, 914 saran tindak dan telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 444 saran tindak, 43 saran dalam proses serta 427 saran masih belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 201.289.594,17, telah diselesaikan Rp 28.784.231,53 (14,31%).

Temuan yang terbanyak berdasarkan pemeriksaan APFP selama tahun 1996/1997 adalah:

- 1) Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok (116 temuan)
- 2) Kelemahan administrasi (110 temuan)
- 3) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (85 temuan)

Penyebab penyimpangan yang utama berdasarkan kelompok penyebab pengawasan adalah sbb:

- 1) Kelemahan dalam pembinaan personil (125 sebab)
- 2) Kelemahan dalam kebijaksanaan (99 sebab)
- 3) Kelemahan dalam rencana (81 sebab)

Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pengendali program, yaitu:

- 1) Akreditasi dokter/dokter spesialis belum lancar.
- 2) Laporan eksekutif tidak menggambarkan kondisi nyata permasalahan kesehatan di wilayah serta terlambatnya pembuatan laporan tahunan.
- 3) Tugas pokok dan fungsi Kandepkes belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengendali program yang menyangkut aspek manajerial maupun pengembalian keuangan negara, antara lain :

- 1) Penyempurnaan ketatalaksanaan (335 peristiwa)
- 2) Tindakan administratif (28 peristiwa)
- 3) Penyetoran uang kepada negara (26 peristiwa)

Hasil pengawasan tidak langsung terhadap program tersebut melalui laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Depkes dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 22:

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI APARATUR NEGARA
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Satuan Kerja (tanpa bel.peg)	585	456	20.126.137.000	18.602.733.000	18.013.034.856	96,83
2	Proyek/BP	33	32	4.589.963.000	4.454.963.000	3.690.726.156	82,85
3	BLN (sub obyek)	9	9	9.216.264.000	9.216.264.000	2.005.888.406	21,76
	JUMLAH	627	497	33.932.364.000	32.273.960.000	23.709.649.418	73,46

Jumlah anggaran program ini adalah Rp 33.932.364.000,- yang terpantau Rp 32.273.960.000,- realisasi Rp 23.709.649.418,- (73,46%).

Permasalahan yang dikemukakan para pelaksana program dan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, karena dibintangi.
- 2) Dana pendamping untuk pengadaan komputer tidak tersedia.

s. Program Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan

Pada program ini hanya dilaksanakan oleh 1 satuan kerja.

Adapun Jumlah alokasi dan realisasi anggaran program ini adalah sebagai berikut:

Tabel 23:

**JUMLAH OBYEK, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENDAYAGUNAAN SISTEM & PELAKSANAAN PENGAWASAN
TAHUN 1996/1997**

NO	JENIS OBYEK	JUMLAH		ALOKASI		REALISASI	%
		OBYEK	TERPANTAU	SELURUH	TERPANTAU		
1	Satuan Kerja (tanpa bel.peg)	1	1	3.568.661.000	3.568.661.000	3.494.860.599	97,93

Jumlah anggaran program ini adalah Rp 3.568.661.000,- dengan realisasi Rp 3.494.860.599,- atau 97,93%.

Rincian jenis dan jumlah temuan serta tindak lanjutnya menurut program dapat dilihat pada lampiran 8.

2. Ikhtisar Hasil Pengawasan Menurut Unit Organisasi

Rekapitulasi temuan, saran tindak, tindak lanjut serta nilai kerugian negara dari hasil pemeriksaan Itjen Depkes, BPKP dan BEPEKA dalam tahun 1996/1997 bila dirinci menurut unit utamanya adalah sebagai berikut :

Tabel 24 :

**REKAPITULASI TEMUAN, PENYEBAB PENYIMPANGAN, SARAN DAN TINDAK
LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP, DAN BEPEKA
TH. 1996/1997
MENURUT UNIT ORGANISASI**

UNIT ORGANISASI	JUMLAH L H P	JUMLAH TEMUAN	JUMLAH PENYEBAB	SARAN TINDAK	TINDAK LANJUT	
					JUMLAH	%
SEKRETARIAT JENDERAL	400	1.066	1.279	1.883	980	52,04
DITJEN BINKESMAS	107	291	392	536	370	69,03
DITJEN YANMEDIK	110	314	354	497	218	43,86
DITJEN PPM & PLP	64	169	196	269	188	69,89
DITJEN POM	38	78	100	131	89	67,94
BALITBANGKES	3	11	12	16	0	0
B U M N	55	102	104	122	25	20,49
JUMLAH	777	2.031	2.437	3.454	1.870	54,14

Dari tabel di atas diketahui bahwa Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (ITJEN, BPKP) dan BEPEKA selama tahun 1996/1997 telah melakukan pemeriksaan terbanyak pada Unit Sekretariat Jenderal menghasilkan 400 LHP dengan 1.066 temuan, 1.279 penyebab dan 1.883 saran tindak serta telah ditindak lanjuti 980 saran tindak (52,04%).

BUMN di lingkungan Depkes hanya diperiksa oleh BPKP , yang menghasilkan 55 LHP, dengan 102 temuan, 104 penyebab dan 122 saran tindak serta telah ditindak lanjuti sebanyak 25 saran (20,49%).

Uraian lebih rinci mengenai jumlah temuan, penyebab, saran tindak dan tindak lanjutnya dari masing-masing aparat pengawasan yang telah melaksanakan pemeriksaan selama tahun 1996/1997 menurut unit organisasi utama dapat dilihat pada lampiran 3, 4, dan 5.

Selain itu, dari hasil pengawasan tersebut diketahui pula jumlah kerugian negara dan penyelesaiannya seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 25 :

**REKAPITULASI KERUGIAN NEGARA
DARI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LHP ITJEN, BPKP, DAN BEPEKA
TAHUN 1996/97
MENURUT UNIT ORGANISASI**

(dalam rupiah)

UNIT ORGANISASI	JUMLAH KERUGIAN NEG	PENYELESAIAN KERUGIAN NEG	%	SISA KERUGIAN NEG
SEKRETARIAT JENDERAL	566.401.614,22	137.345.773,53	24,25	429.055.840,69
DITJEN BINKESMAS	257.996.548,80	14.748.403,00	5,72	243.248.145,80
DITJEN YANMEDIK	669.704.300,09	147.713.163,64	22,06	521.991.136,45
DITJEN PPM & PLP	52.919.678,19	41.623.389,39	78,65	11.296.288,80
DITJEN POM	9.987.696,49	6.086.521,49	60,94	3.901.175,00
BALITBANGKES	16.821.000,00	0,00	0,00	16.821.000,00
B U M N	389.402.895,43	102.556.096,54	26,34	286.846.798,89
JUMLAH	1.963.233.733,22	450.073.347,59	22,93	1.513.160.385,63

Catatan : % penyelesaian kerugian negara dari jumlah kerugian negara

Kerugian negara yang diketahui dari hasil pengawasan tersebut selama tahun 1996/1997 sebesar Rp 1.963.233.733,22 dan yang telah berhasil diselesaikan sebesar Rp 450.073.347,59 (22,93%) sisanya masih dalam proses atau belum bisa ditagih kembali.

Rincian kerugian negara menurut unit organisasi oleh masing-masing aparat pengawasan fungsional dapat dilihat pada lampiran 14, 15, dan 16

3. Ikhtisar Hasil Pengawasan Menurut Provinsi

Rekapitulasi temuan, saran tindak, tindak lanjut serta nilai kerugian negara dari hasil pemeriksaan Itjen Depkes, BPKP dan BEPEKA dalam tahun 1996/1997 bila dirinci menurut lokasi adalah sebagai berikut :

Tabel 26 :

**REKAPITULASI TEMUAN, PENYEBAB PENYIMPANGAN, SARAN DAN TINDAK
LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP, DAN BEPEKA
TH. 1996/1997
MENURUT PROVINSI**

PROVINSI	JUMLAH L H P	JUMLAH TEMUAN	JUMLAH PENYEBAB	SARAN TINDAK	TINDAK LANJUT	
					JUMLAH	%
1. DKI. JAKARTA	55	170	174	258	85	32,95
2. JAWA BARAT	46	122	142	212	123	58,02
3. JAWA TENGAH	58	174	212	286	120	41,96
4. DI. YOGYA	11	37	51	66	63	95,45
5. JAWA TIMUR	40	103	141	200	150	75,00
6. D.I. ACEH	69	107	115	145	110	75,86
7. SUMATERA UTARA	52	127	165	257	148	57,59
8. SUMATERA BARAT	46	131	162	222	130	58,56
9. RIAU	31	76	94	123	88	71,54
10. JAMBI	13	36	49	69	6	8,70
11. SUMATERA SELATAN	13	32	40	49	20	40,82
12. LAMPUNG	24	41	53	59	32	54,24
13. KALIMANTAN BARAT	15	37	47	70	6	8,57
14. KALIMANTAN TENGAH	17	44	52	76	61	80,26
15. KALIMANTAN SELATAN	33	80	91	119	91	76,47
16. KALIMANTAN TIMUR	11	25	29	43	11	25,58
17. SULAWESI UTARA	26	77	104	148	56	37,84
18. SULAWESI TENGAH	25	50	59	75	19	25,33
19. SULAWESI SELATAN	32	90	95	119	94	78,99
20. SULAWESI TENGGARA	18	44	54	96	42	43,75
21. MALUKU	16	64	72	108	78	72,22
22. BALI	22	54	64	108	48	44,44
23. N T B	23	57	69	103	68	66,02
24. N T T	23	65	90	127	40	31,50
25. IRIAN JAYA	13	46	58	95	21	22,11
26. BENGKULU	24	57	73	107	91	85,05
27. TIMOR TIMUR	0	0	0	0	0	0,00
28. P U S A T	21	85	81	114	69	60,53
JUMLAH	777	2.031	2.436	3.454	1.870	54,14

Uraian lebih rinci mengenai jumlah temuan, penyebab, saran tindak dan tindak lanjutnya dari masing-masing aparat pengawasan yang telah melaksanakan pemeriksaan selama tahun 1996/1997 menurut provinsi dapat dilihat pada lampiran 6, 7, 8, dan 9.

Selain itu, dari hasil pengawasan tersebut diketahui pula jumlah kerugian negara dan penyelesaiannya seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 29 :

**REKAPITULASI KERUGIAN NEGARA
DARI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LHP ITJEN, BPKP, DAN BEPEKA
TAHUN1996/97
MENURUT PROVINSI**

UNIT ORGANISASI	JUMLAH KERUGIAN NEG	PENYELESAIAN KERUGIAN NEG	(Dalam Rupiah)	
			%	SISA KERUGIAN NEG
1. DKI JAKARTA	255.607.315,36	39.974.620,00	15,64	215.632.695,36
2. JAWA BARAT	145.642.150,89	8.110.012,00	5,57	137.532.138,89
3. JAWA TENGAH	256.853.755,10	83.422.372,00	32,48	173.431.383,10
4. DI YOGYA	19.454.076,08	19.454.076,08	100	0,00
5. JAWA TIMUR	64.130.634,40	12.471.834,40	31,24	27.450.900,00
6. D.I ACEH	45.408.437,00	25.194.571,36	55,48	20.213.865,64
7. SUMATERA UTARA	44.334.201,00	33.842.535,00	76,34	10.491.666,00
8. SUMATERA BARAT	110.376.017,75	23.625.353,75	21,40	86.750.664,00
9. RIAU	6.973.550,59	6.973.550,59	100	0,00
10. JAMBI	3.061.625,00	1.358.000,00	44,36	1.703.625,00
11. SUMATERA SELATAN	62.393.039,66	15.720.510,29	25,20	46.672.529,37
12. LAMPUNG	8.888.521,14	4.948.523,14	55,67	3.939.998,00
13. KALIMANTAN BARAT	57.165.072,03	5.284.618,00	9,24	51.880.454,03
14. KALIMANTAN TENGAH	54.719.490,22	4.080.276,63	7,46	50.639.213,59
15. KALIMANTAN SELATAN	82.776.571,00	230.450,00	0,28	82.546.121,00
16. KALIMANTAN TIMUR	82.487.722,80	3.923.102,80	4,76	78.564.620,00
17. SULAWESI UTARA	35.113.911,78	5.677.750,00	16,17	29.436.161,78
18. SULAWESI TENGAH	19.255.474,25	19.255.474,25	100	0,00
19. SULAWESI SELATAN	238.540.724,30	4.915.891,30	2,06	233.624.833,00
20. SULAWESI TENGGARA	30.656.814,68	450.000,00	1,47	30.206.814,68
21. MALUKU	47.780.245,83	38.993.300,00	81,61	8.786.945,83
22. BALI	33.848.659,00	4.398.195,00	12,99	29.450.464,00
23. N T B	38.715.249,00	9.718.651,00	25,10	28.996.598,00
24. N T T	64.322.580,00	25.341.992,00	39,40	38.980.588,00
25. IRIAN JAYA	37.412.956,36	20.430.261,00	54,61	16.982.695,36
26. BENGKULU	49.184.857,00	29.123.004,00	59,21	20.061.853,00
27. TIMOR TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
28. P U S A T	68.135.081,00	3.154.423,00	4,63	64.980.658,00
JUMLAH	1.963.233.733,22	450.073.347,59	22,93	1.513.160.385,63

Catatan : % penyelesaian kerugian negara dari jumlah kerugian negara

Rincian kerugian negara dan penyelesaiannya menurut provinsi oleh masing-masing aparat pengawasan fungsional dapat dilihat pada lampiran 10, 11, 12 dan 13.

4. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat disalurkan dalam bentuk pengaduan melalui Tromol Pos (TP) 5000 dan pengaduan langsung ke Inspektorat Jenderal.

a. Informasi Masyarakat melalui Tromol Pos 5000

Pengaduan masyarakat melalui TP 5000 yang diterima Itjen Depkes pada tahun 1996/1997 bila dikelompokkan menurut jenis masalah dan tingkat kebenarannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 30 :

**PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000
YANG DITERIMA ITJEN DEPKES SELAMA TH.1996/1997
MENURUT JENIS DAN TINGKAT KEBENARANNYA**

JENIS MASALAH	JUMLAH PENGADUAN	JUMLAH YANG DITANGGAPI	MENGANDUNG KEBENARAN	%
1. Penyalahgunaan Wewenang Aparat Pemerintah	34	20	2	10
2. Pelayanan Masyarakat	12	11	2	18,2
3. Korupsi/Pungutan Liar	6	2	0	0
4. Kepegawaian/Ketenagaan	12	6	4	66,7
5. Keagrariaan/Perumahan	2	2	1	50
6. Hukum/Peradilan	3	0	0	0
7. Tatalaksana Pemerintahan/ Birokrasi	0	0	0	0
8. Tatalaksana Pemerintahan/	1	0	0	0
9. Lingkungan Hidup	0	0	0	0
JUMLAH	70	41	9	22

Catatan : % kebenaran dari jumlah yang ditanggapi.

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pengaduan masyarakat melalui Tromol Pos 5000 yang diterima Itjen Depkes selama tahun 1996/1997 berjumlah 70 pengaduan, telah ditanggapi 41 pengaduan dan 9 pengaduan (22%) diantaranya mengandung kebenaran.

Dilihat dari jenis masalah terbanyak adalah penyalahgunaan wewenang aparaturnya pemerintah sebanyak 34 pengaduan (45,6%), pelayanan masyarakat dan kepegawaian/ketenagaan masing-masing 12 pengaduan (17,1%) serta korupsi/pungutan liar 6 pengaduan (8,6%)

Apabila pengaduan masyarakat melalui tromol pos 5000 tersebut dikelompokkan menurut unit utama, maka tergambar sebagai berikut :

Tabel 31 :

**PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000
YANG DITERIMA ITJEN DEPKES SELAMA TH.1996/1997
MENURUT UNIT UTAMA DAN TINGKAT KEBENARANNYA**

UNIT UTAMA	JUMLAH PENGADUAN	JUMLAH YANG DITANGGAPI	MENGANDUNG KEBENARAN	%
1. SEKRETARIAT JENDERAL	7	4	1	25
2. INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	0	0
3. DITJEN BINKESMAS	2	2	0	0
4. DITJEN YANMEDIK	6	5	1	20
5. DITJEN PPM & PLP	2	1	0	0
6. DITJEN POM	2	0	0	0
7. BADAN LITBANGKES	0	0	0	0
8. KANWIL	45	24	4	16,7
9. B U M N	6	5	3	60
JUMLAH	70	41	9	22

Catatan : % kebenaran dari jumlah yang ditanggapi.

b. Informasi Masyarakat Langsung

Pengaduan masyarakat secara langsung ke Itjen Depkes pada tahun 1996/1997 yang dikelompokkan menurut jenis masalah dan tingkat kebenarannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 32 :

**PENGADUAN MASYARAKAT LANGSUNG
YANG DITERIMA ITJEN DEPKES SELAMA TH.1996/1997
MENURUT JENIS DAN TINGKAT KEBENARANNYA**

JENIS MASALAH	JUMLAH PENGADUAN	JUMLAH YANG DITANGGAPI	MENGANDUNG KEBENARAN	%
1. Penyalahgunaan Wewenang Aparat Pemerintah	29	13	1	7,7
2. Pelayanan Masyarakat	11	4	3	75
3. Korupsi/Pungutan Liar	0	0	0	0
4. Kepegawaian/Ketenagaan	13	9	2	22,2
5. Keagrariaan/Perumahan	0	0	0	0
6. Hukum/Peradilan	0	0	0	0
7. Tatalaksana Pemerintahan/Birokrasi	3	3	2	33,3
7. Kewaspadaan Nasional	1	1	1	100
9. Lingkungan Hidup	0	0	0	0
JUMLAH	57	30	8	26,7

Catatan : % kebenaran dari jumlah yang ditanggapi

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung ke Itjen Depkes selama tahun 1996/1997 berjumlah 57 pengaduan, telah ditanggapi 30 pengaduan dan 8 pengaduan (26,7%) diantaranya mengandung kebenaran.

Dilihat dari jenis masalah terbanyak adalah penyalahgunaan wewenang aparatur pemerintah sebanyak 29 pengaduan (50,88%), kepegawaian/ketenagaan 13 pengaduan (22,81%) serta pelayanan masyarakat 11 pengaduan (19,30%)

Apabila pengaduan masyarakat langsung tersebut dikelompokkan menurut unit utama, maka tergambar sebagai berikut :

Tabel 33 :

**PENGADUAN MASYARAKAT LANGSUNG
YANG DITERIMA ITJEN DEPKES SELAMA TH.1996/1997
MENURUT UNIT UTAMA DAN TINGKAT KEBENARANNYA**

UNIT UTAMA	JUMLAH PENGADUAN	JUMLAH YG DITANGGAPI	MENGANDUNG KEBENARAN	%
1. SEKRETARIAT JENDERAL	9	5	0	0
2. INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	0	0
3. DITJEN BINKESMAS	1	1	0	0
4. DITJEN YANMEDIK	4	2	0	0
5. DITJEN PPM & PLP	0	0	0	0
6. DITJEN POM	1	1	1	100
7. BADAN LITBANGKES	1	1	0	0
8. KANWIL	40	19	7	36,8
9. B U M N	1	1	0	0
JUMLAH	57	30	8	26,7

Catatan : % kebenaran dari jumlah yang ditanggapi.

5. Pemeriksaan Khusus dan Post Audit

Dalam tahun 1996/1997 Itjen Depkes telah melaksanakan Pemeriksaan Khusus dan Post Audit terhadap 21 obyek dengan 39 temuan. Rekapitulasi pelaksanaan tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan Khusus dan Post Audit tersebut seperti tertera dalam ikhtisar berikut :

Tabel 34 :

**REKAPITULASI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS DAN POST AUDIT ITJEN DEPKES
TAHUN 1996/1997
MENURUT JENIS TEMUAN.**

KO DE	JENIS TEMUAN	JUMLAH TEMUAN	SARAN TINDAK	TINDAK LANJUT	%
01	Kebocoran yg merugikan Negara	4	7	3	42,86
05	Penyimpangan dari ketentuan anggaran	3	6	0	0
07	Hambatan thd kelancaran tugas pokok	9	4	0	0
08	Kelemahan administrasi	2	10	0	0
09	Ketidak lancaran pelayanan kepada masy	3	4	0	0
10	Temuan pemeriksaan lainnya	18	23	9	39,13
	JUMLAH	39	54	12	22,22

Catatan : % tindak lanjut dari saran tindak.

6. Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan LP2P adalah:

- a. Keppres No.33 tahun 1986, tentang kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah.
- b. Inpres Nomor 15 tahun 1983, tentang Pedoman pelaksanaan pengawasan.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) No.30 tahun 1980, tentang Peraturan disiplin pegawai negeri sipil.
- d. Surat Edaran Menteri Kesehatan No.145/Menkes/SE/III/1991, tentang Ketaatan penyampaian laporan pajak-pajak pribadi (LP2P).

Daftar nama wajib pajak LP2P hasil pencatatan Inspektorat Jenderal tahun anggaran 1996/1997 tercatat sebanyak 12.738 orang. Dari sejumlah wajib pajak tersebut yang mengirim LP2P ke Inspektorat Jenderal sebanyak 11.217 orang (88,1%)

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN MANAJERIAL (PENUNJANG)

A. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah tenaga Inspektorat Jenderal Depkes kondisi per 31 Maret 1997 adalah 186 tenaga dengan rincian 76 tenaga teknis pemeriksa dan 110 tenaga administrasi. Apabila dibandingkan dengan formasi yang ada, maka tenaga Itjen Depkes baru mencapai 85,7%, dengan rincian untuk tenaga teknis kurang 25 orang dan untuk tenaga administrasi kurang 6 orang. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 35 :

**JUMLAH TENAGA/PEGAWAI ITJEN DEPKES
DISUSUN MENURUT ESELON
(Keadaan per 31 Maret 1997)**

NO	JENIS TENAGA, ESELON	FORMASI	JABATAN YG TERISI	SELISIH
	<u>TEKNIS</u>			
1	ESELON I	1	1	0
2	ESELON II	4	4	0
3	ESELON III	16	13	3
4	ESELON IV	80	58	22
	SUB TOTAL 1	101	76	25
	<u>ADMINISTRASI</u>			
1	ESELON II	1	1	0
2	ESELON III	4	4	0
3	ESELON IV	11	10	1
4	STAF SEKRETARIAT	100	95	5
	SUB TOTAL 2	116	110	6
	JUMLAH	217	186	31

Apabila dirinci menurut pendidikan, jumlah tenaga yang berpendidikan Akademi/D3, S1 dan S2 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan SLTA kebawah yaitu 119 tenaga (63%). Hal ini memungkinkan pegawai lebih mendukung untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 36:

**JUMLAH TENAGA/PEGAWAI ITJEN DEPKES
DISUSUN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
(Keadaan per 31 Maret 1997)**

NO	JENIS TENAGA, PENDIDIKAN	JUMLAH	%
	<u>TEKNIS</u>		
1	STRATA II (S2)	7	9,2
2	STRATA I (S1)	64	84,2
3	SARJANA MUDA/D III	3	4,0
4	SLTA	2	2,6
	SUB TOTAL 1	76	100,0
	<u>ADMINISTRASI</u>		
1	STRATA II (S2)	1	0,9
2	STRATA I (S1)	37	33,6
3	SARJANA MUDA/D III	7	6,4
4	SLTA	62	56,4
5	DIBAWAH SLTA	3	2,7
	SUB TOTAL 2	110	100,0
	JUMLAH	186	

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pegawai maka Itjen Depkes melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional, kalakarya, dan pelatihan penjenjangan. Dalam tahun 1996/1997 telah dilaksanakan sebanyak 5 Diklat/kalakarya dengan melibatkan seluruh tenaga teknis, struktural dan sebagian staf yang potensial untuk pengembangan karirnya. Diklat /kalakarya yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Pelatihan Pemeriksaan Operasional
2. Pelatihan Pemeriksaan Keuangan
3. Kalakarya Pemeriksaan Komprehensif
4. Kalakarya Temuan Pemeriksaan (TP III)
5. Kalakarya Jabatan Fungsional

Pelatihan penjenjangan dilaksanakan oleh 6 orang meliputi 4 orang pelatihan ADUM dan 2 orang SPAMA

Selama tahun 1996/1997, Itjen Depkes telah memberikan kesempatan peningkatan pendidikan melalui jalur tugas belajar sebanyak 1 orang yaitu pada jenjang Strata. Sedangkan jalur izin belajar diberikan kesempatan kepada 36 orang dengan rincian 17 orang untuk jenjang Strata 2 dan 19 orang untuk jenjang strata 1.

B. PENGELOLAAN KEUANGAN

Anggaran Rutin (DIK) Itjen Depkes tahun 1996/1997 yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan sebesar Rp 4.565.094.000,-. Apabila dibandingkan dengan anggaran Derpkas keseluruhan (Rutin + Pembangunan + BLN + OPRS, belum termasuk Inpres dan SBBO) sejumlah Rp 1.157,9 milyar, maka bobot anggaran Itjen hanya 0,39% dari anggaran Depkes tersebut.

Realisasi anggaran Rutin Itjen secara keseluruhan dalam tahun 1996/1997 sebesar Rp 4.543.454.675,- (99,53%), sedangkan realisasi non belanja pegawai adalah Rp 3.494.020.833,- (97,91%) dari alokasi anggaran non belanja pegawai Rp 3.568.661.000,-.

Anggaran tersebut dapat menjangkau 282 obyek pemeriksaan reguler atau sekitar 0,35% dari jumlah seluruh obyek pemeriksaan yang ada (Rutin 1.008 obyek, proyek 1.073 obyek dan OPRS 407 obyek, dengan catatan BLN hanya sebagai sub obyek dari proyek).

Ikhtisar pelaksanaan anggaran Inspektorat jenderal Depkes dalam tahun anggaran 1996/1997 tertera pada tabel berikut.

Tabel 37 :

REALISASI ANGGARAN RUTIN ITJEN DEPKES
TAHUN 1996/1997

(dalam Rupiah)

JENIS PENGELIARAN (M.A)	ALOKASI	REALISASI	%
1. Bel. Barang	786.628.000,00	768.835.333,00	97,74
2. Bel. Pemeliharaan	87.150.000,00	58.546.650,00	67,18
3. Bel. Perjalanan	2.694.883.000,00	2.666.638.850,00	98,95
Sub Jumlah	3.568.661.000,00	3.494.020.833,00	97,91
4. Bel. Pegawai	996.433.000,00	1.049.433.842,00	105,32
Jumlah	4.565.094.000,00	4.543.454.675,00	99,53

Tabel 38 :

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN ITJEN TAHUN 1996/1997

(dalam rupiah)

JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%	DISETOR	%
1. Sewa Rumah Dinas	500.000	907.480	181,50	907.480	100
2. Lain-lain :	500.000	2.537.184	491,24	2.537.184	100
a. Jasa Lembaga Keuangan		1.051.710		1.051.710	100
b. Penerimaan kembali Bel. Pegawai th. berjalan		1.371.040		1.371.040	100
c. Penerimaan kembali bel. Rutin th. berjalan		114.434		114.434	100
JUMLAH 1+ 2	1.000.000	3.444.664	344,47	3.444.664	100

C. PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

Pengelolaan perlengkapan kantor Inspektorat Jenderal Depkes dalam tahun 1996/1997 adalah sebagai berikut :

Tabel 39 :

SARANA DAN PRASARANA INSPEKTORAT JENDERAL DEPKES

SARANA/PRASARANA	JUMLAH
A BARANG TIDAK BERGERAK	
Rumah Dinas	
• RTT Gol. II Permanen Type D.50	6
• RTT Gol. II Permanen Type E.36	1
• RTT Gol. II Permanen Type F.21	5
B BARANG BERGERAK	
1. Komputer	43
2. Kendaraan Roda Dua	1
3. Kendaraan Roda Empat	10
4. Peralatan Kantor :	
• Mesin Ketik	57
• Wireless	2
• Overhead Projector	2
• TV	1
• Kamera	2
• Kulkas	2
• video Kamera	1
• Tape Recorder	4
• Mesin Stensil	3
• Mesin Foto copy	1
• Brankas	4
• Mesin Pemotong Kertas	1
• Mesin Penghancur Kertas	2
• Mesin Penghapus Debu	2
• Loudspeaker	2
• Megaphone	2
• Amplifier	1
• Mesin Penjilid	122
• Filling Cabinet	24
• White Board	21
• Jam Dinding	4
• Foto Presiden dan Wakil Presiden	1
• Tangga Aluminium	1
• Mesin Rex Rotary	2
• Movie Tex Board	5
• Faximile	
5. Meubeler :	
• Meja Kerja Kayu	262
• Kursi Besi/metal	677
• Sice	32
• Meja Rapar	13
• Lemari Kayu	91
• Roll Opect	8
• Meja Telepon	5
• Karpet	2
• Meja Besi	13

D. PELAKSANAAN KEGIATAN LAINNYA

Di samping melaksanakan kegiatan tersebut di atas, Itjen Depkes juga melaksanakan kegiatan manajerial/penunjang lainnya yaitu :

1. Menyusun laporan reguler hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Depkes meliputi laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
2. Mengolah dan menganalisa Laporan Keadaan Kas Anggaran Rutin/Proyek yang selanjutnya dipakai sebagai bahan desk audit.
3. Mengolah dan menganalisa Laporan triwulan kemajuan proyek-proyek Depkes sebagai hasil pengawasan tidak langsung yang selanjutnya diumpankanbalikkan kepada pelaksana dan pengendali program.
4. Membuat rencana tahunan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan.
5. Menyusun hasil pengawasan Itjen Depkes untuk sumbangan bahan pidato kenegaraan 16 Agustus dan pengantar nota keuangan & RAPBN.
6. Menyusun hasil pengawasan Itjen Depkes untuk sumbangan bahan hearing DPR dengan Komisi VIII.
7. Menyusun hasil pengawasan Itjen Depkes untuk sumbangan bahan Rakerkesnas.
8. Menyusun hasil pengawasan Itjen Depkes untuk sumbangan bahan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan Kantor Wapres
9. Menyusun laporan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan pengawasan Departemen Kesehatan.
10. Melaksanakan tahapan penyusunan anggaran dari mulai Pra DUK, DUK, Pra DIK dan DIK.
11. Dalam rangka menuntaskan tindak lanjut hasil pemeriksaan, maka dilaksanakan kegiatan pemutahiran data hasil pengawasan APFP (Itjen, BPKP dan BEPEKA) dengan Unit terkait.
12. Dalam rangka menunjang pelaporan reguler, khususnya laporan triwulan dan tahunan Itjen Depkes, maka dilaksanakan pengolahan dan analisa data hasil pengawasan.

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

Dalam tahun 1996/1997 permasalahan yang dihadapi sebagai tantangan saat ini maupun potensial ke depan yang perlu terus diupayakan pemecahannya adalah meliputi masalah intern maupun ekstern Inspektorat Jenderal.

A. TANTANGAN

1. Semakin meningkatnya anggaran Depkes dan meluasnya program memerlukan peningkatan dan penyempurnaan pengawasan.
2. Adanya kebijaksanaan pengawasan untuk melaksanakan pemeriksaan komprehensif di berbagai tingkat entitas, belum dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Proyek-proyek PPKM (Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat) yang tersebar di semua daerah tingkat II belum seluruhnya terjangkau pengawasan.
4. Tumpang tindih pemeriksaan di lapangan antara ITJEN, BPKP dan BEPEKA belum seluruhnya terhindari meskipun sudah ada koordinasi sejak perencanaan.
5. Tindak lanjut atas beberapa hasil pemeriksaan yang menyangkut kerugian negara masih mengalami kendala dalam penyelesaiannya.
6. Koordinasi tindak lanjut antara sesama APFP maupun dengan pengendali program belum mantap sehingga masih terjadi kurang terpaduan dalam pelaksanaan dan pengesahan tindak lanjut.
7. Belum tersusunnya standar-standar kinerja (standar kemampuan kerja) yang dibutuhkan Itjen menyangkut kegiatan-kegiatan utama, antara lain pemeriksaan reguler (komprehensif), pemeriksaan khusus dan pemantauan tindak lanjut.

B. KENDALA

1. Penafsiran atas konsepsi pemeriksaan komprehensif belum sama, serta belum adanya standar kinerja pemeriksaan menurut klasifikasi kelompok jenis obyek yang memadai yang perlu dirumuskan berdasarkan hasil studi.
2. Cakupan pemeriksaan terhadap proyek PPKM rendah karena terbatasnya tenaga pemeriksa dan besarnya biaya yang dibutuhkan.
3. Terbatasnya tenaga pemeriksa khususnya yang memenuhi kualifikasi untuk pemeriksaan komprehensif.
4. Dijumpainya tumpang tindih pemeriksaan di lapangan karena masih rendahnya komitmen terhadap rencana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan, baik dari segi obyek pemeriksaa serta masih lemahnya kerjasama dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan.

5. Inventarisasi kriteria/standar pengawasan dan upaya penyusunan pedoman pengawasan, diperlukan waktu yang cukup dan di laksanakan secara bertahap mengingat perlu ada komunikasi dan kerja sama dengan para pengendali dan pelaksana program.

C. PELUANG

1. Telah disetujuinya bantuan dana dari WHO untuk membiayai konsultan jangka pendek (3 bulan) dalam bidang pemeriksaan komprehensif.
2. Perlu ada kerjasama kemitraan dengan pihak Kanwil terutama dalam pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, pengecekan pengaduan masyarakat dan penyelesaian kerugian negara.
3. Inventarisasi kriteria/standar pengawasan dan upaya penyusunan berbagai pedoman pengawasan akan terus dikembangkan secara bertahap sesuai penyediaan sumber daya dan waktu yang tersedia.
4. Upaya yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, berupa:
 - a) Pembinaan teknis dan moral pengawas untuk meningkatkan kinerja Itjen.
 - b) Dalam hal pengawasan tidak langsung terus dilakukan pembenahan pengolahan dan analisa informasi-informasi yang disampaikan ke Itjen sebagai bahan desk audit serta keperluan pengawasan secara umum. Hasil pengawasan tidak langsung sama pentingnya dengan hasil pengawasan langsung, oleh karena itu saran tindak dari hasil pengawasan tidak langsung juga perlu mendapatkan perhatian serius para pelaksana dan pengendali program.
 - c) Pembenahan dan peningkatan efisiensi kegiatan penunjang di lingkungan Sekretariat juga terus dikembangkan antara lain upaya penertiban kearsipan dan dokumentasi, ketatausahaan, perencanaan pengawasan dan komputerisasi.
 - d) Semakin meningkatnya koordinasi pengawasan baik dengan BPKP maupun antar institusi pengawasan melalui Forum Komunikasi Sekretaris Itjen Departemen.
 - e) Dengan telah ditetapkan jabatan fungsional bagi auditor akan memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia ke arah profesionalisme yang lebih tinggi.
 - f) Penyempurnaan struktur organisasi Itjen yang disesuaikan dengan jabatan fungsional auditor telah mendapat persetujuan Menkes, saat ini sedang dalam taraf penyelesaian.
 - g) Perlu ada kerja sama dengan para pengendali dan pelaksana program dalam merumuskan standar kinerja atau standar kemampuan kerja di bidang pengawasan, antara lain standar kinerja pemeriksaan dan standar kinerja pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan.

BAB VI PENUTUP

Sebagai bahan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan tahun 1996/1997, laporan tahunan ini berintikan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok, tugas manajerial (penunjang) serta tugas lainnya yang dianggap penting. Intisari laporan berupa kesimpulan laporan tahun 1996/1997 disajikan pada bagian awal buku ini, dimaksudkan sebagai laporan eksekutif.

DISPERPUSIP JATIM

REKAPITULASI JUMLAH LHP, TEMUAN, PENYEBAB, SARAN TINDAK
DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPKP
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997
MENURUT : PROGRAM

PRO GRAM	U B A I A N	JUMLAH			SARAN TINDAK	TINDAK LANJUT		
		LHP	TEMUAN	SEBAB		TUNTAS	D P	JUMLAH
1	PENYULUHAN KES MASYARAKAT	7	14	16	17	9	0	9
2	YAN KESEHATAN MASYARAKAT	23	57	69	74	19	8	27
3	KESEHATAN RUJUKAN & RS	97	257	265	355	184	14	198
4	P 2 M	25	64	72	90	63	4	67
5	PERBAIKAN GIZI	12	26	32	35	25	2	27
6	P O M	31	64	81	102	74	1	75
7	PEMB PENGOBAT TRADISIONAL	0	0	0	0	0	0	0
8	P P A B	4	7	8	7	6	0	6
9	PENYEH LINGKUNGAN & PEM	8	17	20	22	17	2	19
10	PENDIDIKAN KEDINASAN	58	152	161	203	110	3	113
11	PENDD & LAT PEG	16	19	20	25	6	1	7
12	PENELITIAN & PENGEMBANGAN	1	6	7	9	0	0	0
13	PEMBINAAN ANAK & REMAJA	0	0	0	0	0	0	0
14	PEMBINAAN PEMUDA	0	0	0	0	0	0	0
15	PERANAN WANITA	0	0	0	0	0	0	0
16	SISTEM INFORMASI KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0
17	PENGEMB HUKUM KESEHATAN	10	27	34	45	30	1	31
18	SARANA & PRASARANA APARATUR	139	362	421	537	344	16	360
19	EFFISIENSI APARATUR NEGARA	0	0	0	0	0	0	0
20	B U M N	55	102	103	122	17	8	25
J U M L A H		486	1174	1309	1643	904	60	964

REKAPITULASI JUMLAH LHP, TEMUAN, PENYEBAB, SARAN TINDAK
DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997
MENURUT : P R O G R A M

P R O G R A M	U R A I A N	J U M L A H			
		L H P	TEMUAN	SEBAB SARAN	T . L
1	PENYULUHAN KES MASYARAKAT				
2	YAN KESEHATAN MASYARAKAT	3	19	20	32
3	KESEHATAN RUJUKAN & RS				
4	P 2 M	3	13	18	14
5	PERBAIKAN GIZI				
6	P O M				
7	PEMB PENGOBAT TRADISIONAL				
8	P P A B				
9	PENYEH LINGKUNGAN & PEM				
10	PENDIDIKAN KEDINASAN	1	9	6	11
11	PENDD & LAT PEG				
12	PENELITIAN & PENGEMBANGAN				
13	PEMBINAAN ANAK & REMAJA				
14	PEMBINAAN PEMUDA				
15	PERANAN WANITA				
16	SISTEM INFORMASI KESEHATAN				
17	PENGEMB HUKUM KESEHATAN				
18	SARANA & PRASARANA APARATUR	2	9	13	10
19	EFFISIENSI APARATUR NEGARA				
20	B U M N				
	J U M L A H	9	50	57	67

REKAPITULASI JUMLAH LHP, TEMUAN, PENYEBAB, SARAN TINDAK
DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEN
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997
MENURUT : UNIT ORGANISASI

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH			SARAN TINDAK	TINDAK LANJUT		
		LHP	TEMUAN	SEBAB		TUNTAS	D P	JUMLAH
1	SEKRETARIAT JENDERAL	162	456	592	1008	329	81	410
2	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	0	0	0	0	0
3	DITJEN BINKESMAS	64	180	260	383	233	35	268
4	DITJEN YANMEDIK	23	84	116	181	52	13	65
5	DITJEN PPM & PLP	24	68	78	136	75	7	82
6	DITJEN P O M	7	14	19	29	14	0	14
7	BADAN LITBANGKES	2	5	5	7	0	0	0
	J U M L A H	282	807	1070	1744	703	136	839

REKAPITULASI JUMLAH LHP, TEMUAN, PENYEBAB, SARAN TINDAK
DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPKP
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997
MENURUT : UNIT ORGANISASI

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH			SARAN TINDAK	TINDAK LANJUT		
		LHP	TEMUAN	SEBAB		TUNTAS	D P	JUMLAH
1	SEKRETARIAT JENDERAL	235	592	667	854	524	25	549
2	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	0	0	0	0	0
3	DITJEN BINKESMAS	40	92	112	121	62	8	70
4	DITJEN YANMEDIK	87	230	238	316	141	12	153
5	DITJEN PPM & PLP	37	88	100	119	86	6	92
6	DITJEN P O M	31	64	81	102	74	1	75
7	BADAN LITBANGKES	1	6	7	9	0	0	0
8	BUMN	55	102	104	122	17	8	25
J U M L A H		486	1174	1309	1643	904	60	964

REKAPITULASI JUMLAH LHP, TEMUAN, PENYEBAB, SARAN TINDAK
DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997
MENURUT : UNIT ORGANISASI

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH				
		LHP	TEMUAN	SEBAB	SARAN	T.L
1	SEKRETARIAT JENDERAL	3	18	19	21	21
2	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	0	0	0
3	DITJEN BINKESMAS	3	19	20	32	32
4	DITJEN YANMEDIK					
5	DITJEN PPM & PLP	3	18	18	14	14
6	DITJEN P O M					
7	BADAN LITBANGKES					
	J U M L A H	9	50	57	67	67

REKAPITULASI TEMUAN, PENYEBAB PENYIMPANGAN DAN SARAN TINDAK
HASIL PEMERIKSAAN ITJEN TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997
MENURUT : PROVINSI

P R O V I N S I	J U M L A H L I T P	J U M L A H T E M U A N	P E N Y E B A B P E N Y I M P A N G A N	S A R A N T I N D A K
1 D.I. ACEH	5	13	20	32
2 SUMATERA UTARA	22	71	92	151
3 SUMATERA BARAT	12	36	47	87
4 R I A U	14	32	44	65
5 J A M B I	4	21	32	50
6 SUMATERA SELATAN	4	12	20	26
7 LAMPUNG	5	16	18	28
8 DKI JAKARTA	20	56	67	121
9 JAWA BARAT	20	57	70	125
10 JAWA TENGAH	12	40	53	82
11 D.I. YOGJAKARTA	4	12	19	24
12 JAWA TIMUR	25	68	106	160
13 KALIMANTAN BARAT	6	20	29	47
14 KALUMANTAN TENGAH	4	11	13	19
15 KALIMANTAN SELATAN	17	34	43	70
16 KALIMANTAN TIMUR	4	9	10	17
17 SULAWESI UTARA	10	39	59	86
18 SULAWESI TENGAH	15	33	40	58
19 SULAWESI SELATAN	4	9	12	16
20 SULAWESI TENGGARA	9	28	35	68
21 M A L U K U	4	13	13	26
22 B A L I	18	39	41	70
23 NUSA TENGGARA BARAT	15	35	47	77
24 NUSA TENGGARA TIMUR	8	28	40	70
25 IRIAN JAYA	8	30	41	76
26 BENGKULU	9	35	48	77
27 TIMOR TIMUR	0	0	0	0
28 P U S A T	4	10	11	16
J U M L A H	282	807	1070	1744

HASIL PEMERIKSAAN ITJEN TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997

MENURUT : PROVINSI

N O	P R O V I N S I	JML LHP	JML TEM	JML SARAN	K O D E T I N D A K L A N J U T								JML T L SARAN	JML TUNTAS	JML D P	BLM DI T L	%
					100	200	300	400	500	600	700	800					
1	D.I. ACEH	5	13	32	1	2	8	0	0	0	21	0	32	24	8	0	100
2	SUMATERA UTARA	22	71	151	1	0	15	0	0	0	38	0	54	39	15	97	36
3	SUMATERA BARAT	12	36	87	3	0	14	0	1	0	32	6	56	42	14	31	64
4	RIAU	14	32	65	0	0	9	0	0	0	40	0	49	40	9	16	75
5	JAMBI	4	21	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
6	SUMATERA SELATAN	4	12	26	0	1	0	0	4	0	2	3	10	10	0	16	38
7	LAMPUNG	5	16	28	2	1	2	0	0	0	13	0	18	16	2	10	64
8	DKI JAKARTA	20	56	121	2	0	5	0	0	6	25	3	41	36	5	80	34
9	JAWA BARAT	20	57	125	2	0	13	0	0	0	47	7	69	56	13	56	55
10	JAWA TENGAH	12	40	82	1	0	4	0	0	0	4	0	9	5	4	73	11
11	D.I. YOGJAKARTA	4	12	24	1	1	10	0	0	0	9	1	22	12	10	2	92
12	JAWA TIMUR	25	68	160	0	1	8	0	0	17	78	8	112	104	8	48	70
13	KALIMANTAN BARAT	6	20	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0
14	KALIMANTAN TENGAH	4	11	19	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	4	79
15	KALIMANTAN SELATAN	17	34	70	1	0	7	0	0	2	51	0	61	54	7	9	87
16	KALIMANTAN TIMUR	4	9	17	0	0	3	0	0	0	5	0	8	5	3	9	47
17	SULAWESI UTARA	10	39	86	0	0	1	0	0	1	23	2	27	26	1	59	31
18	SULAWESI TENGAH	15	33	58	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	56	3
19	SULAWESI SELATAN	4	9	16	0	1	3	0	0	0	6	2	12	9	3	4	0
20	SULAWESI TENGGARA	9	28	68	0	1	3	0	0	0	30	1	35	32	3	33	51
21	MALUKU	4	13	26	5	2	5	0	0	0	13	0	25	20	5	1	96
22	BALI	18	39	70	1	0	0	0	0	0	11	1	13	13	0	57	19
23	NUSA TENGGARA BARAT	15	35	77	0	2	6	0	0	5	36	1	50	44	6	27	65
24	NUSA TENGGARA TIMUR	8	28	70	1	0	11	0	0	2	12	0	26	15	11	44	37
25	IRIAN JAYA	8	30	76	1	0	5	0	0	0	12	1	19	14	5	57	25
26	BENGKULU	9	35	77	1	1	4	0	0	10	56	0	72	68	4	5	94
27	TIMOR TIMUR				0	0	0	0	0	0	0	0					
28	PUSAT	4	10	16	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	14	0
J U M L A H		282	807	1744	23	13	136	0	5	43	583	36	839	703	136	905	48

REKAPITULASI JUMLAH LHP, TEMUAN, PENYEBAB, SARAN TINDAK
DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPKP
TAHUN ANGGARAN : 1996 / 1997
MENURUT : PROVINSI

NO	P R O V I N S I	JUMLAH				TINDAK LANJUT		
		L H P	TEMUAN	SEBAB	SARAN	TUNTAS	D P	JUMLAH
1	D.I. ACEH	64	94	95	113	78	0	78
2	SUMATERA UTARA	30	56	73	106	89	5	94
3	SUMATERA BARAT	34	95	115	135	67	7	74
4	RIAU	17	44	50	58	39	0	39
5	JAMBI	9	15	17	19	6	0	6
6	BENGKULU	15	22	25	30	18	1	19
7	SUMATERA SELATAN	9	20	20	23	10	0	10
8	LAMPUNG	19	25	35	31	14	0	14
9	DKI JAKARTA	34	113	106	137	44	0	44
10	JAWA BARAT	26	65	72	87	53	1	54
11	JAWA TENGAH	46	134	159	204	111	0	111
12	D.I. YOGJAKARTA	7	25	32	42	40	1	41
13	JAWA TIMUR	15	35	35	40	37	1	38
14	KALIMANTAN SELATAN	16	46	48	49	19	11	30
15	KALIMANTAN TIMUR	7	16	19	26	3	0	3
16	KALIMANTAN BARAT	9	17	18	23	6	0	6
17	KALIMANTAN TENGAH	13	33	39	57	37	9	46
18	SULAWESI UTARA	16	38	45	62	25	4	29
19	SULAWESI TENGAH	10	17	19	17	13	4	17
20	SULAWESI TENGGARA	9	16	19	28	4	3	7
21	SULAWESI SELATAN	28	81	83	103	81	1	82
22	BALI	4	15	23	38	33	2	35
23	MALUKU	12	51	59	82	53	0	53
24	NUSA TENGGARA BARAT	8	22	22	26	10	8	18
25	NUSA TENGGARA TIMUR	15	37	50	57	14	0	14
26	IRIAN JAYA	5	18	17	19	0	2	2
27	TIMOR TIMUR	0	0	0	0	0	0	0
28	PUSAT	9	26	14	31	0	0	0
J U M L A H		486	1174	1309	1643	904	60	964

REKAPITULASI JUMLAH LHP, TEMUAN, PENYEBAB, SARAN TINDAK
DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA
TAHUN ANGGARAN : 1996 / 1997
MENURUT : PROVINSI

NO	P R O V I N S I	J U M L A H				
		L H P	TEMUAN	SEBAB	SARAN	T . L
1	PUSAT	9	50	57	67	67
	J U M L A H	9	50	57	67	67

REKAPITULASI KERUGIAN NEGARA
HASIL PEMERIKSAAN ITJEN TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997
MENURUT : PROVINSI

NO	P R O V I N S I	JUMLAH L H P	JUMLAH KASUS	KERUGIAN NEGARA
1	D.I. ACEH	1	1	515,926.00
2	SUMATERA UTARA	4	4	4,367,134.00
3	SUMATERA BARAT	7	12	31,587,557.00
4	RIAU	0	0	0.00
5	JAMBI	0	0	0.00
6	SUMATERA SELATAN	0	0	0.00
7	LAMPUNG	1	2	1,657,669.00
8	DKI JAKARTA	3	6	26,135,902.00
9	JAWA BARAT	5	7	47,703,386.00
10	JAWA TENGAH	2	2	53,052,871.00
11	D.I. YOGJAKARTA	1	1	17,992,476.08
12	JAWA TIMUR	1	3	27,450,900.00
13	KALIMANTAN BARAT	3	6	44,139,853.23
14	KALIMANTAN TENGAH	0	0	0.00
15	KALIMANTAN SELATAN	1	1	552,000.00
16	KALIMANTAN TIMUR	1	1	765,000.00
17	SULAWESI UTARA	2	3	22,303,861.78
18	SULAWESI TENGAH	1	1	496,008.00
19	SULAWESI SELATAN	1	1	1,658,000.00
20	SULAWESI TENGGARA	1	1	1,350,000.00
21	MALUKU	3	6	31,441,600.00
22	BALI	4	4	1,345,464.00
23	NUSA TENGGARA BARAT	0	0	0.00
24	NUSA TENGGARA TIMUR	5	5	9,224,235.00
25	IRIAN JAYA	4	6	11,587,903.36
26	BENGKULU	2	3	3,475,152.00
27	TIMOR TIMUR	0	0	0.00
28	PUSAT	2	2	39,782,070.00
J U M L A H		55	78	378,584,968.45

REKAPITULASI KERUGIAN NEGARA DAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN ITJEN TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997
MENURUT : PROVINSI

NO	P R O V I N S I	J U M L A H KERUGIAN NEGARA	P E N Y E L E S A I A N KERUGIAN NEGARA	S I S A KERUGIAN NEGARA	
1	D.I. ACEH	515.926.00	515.926.00	0.00	100
2	SUMATERA UTARA	4.367.134.00	35.074.00	4.332.060.00	1
3	SUMATERA BARAT	31.587.557.00	11.592.727.00	19.994.830.00	37
4	RIAU				
5	JAMBI				
6	SUMATERA SELATAN				
7	LAMPUNG	1.657.669.00	0.00	1.657.669.00	0
8	DKI JAKARTA	25.135.902.00	3.043.321.00	23.092.581.00	12
9	JAWA BARAT	47.703.386.00	1.460.679.00	46.242.707.00	3
10	JAWA TENGAH	53.052.871.00	833.786.00	52.219.085.00	2
11	D.I. YOGJAKARTA	17.992.476.08	17.992.476.08	0.00	100
12	JAWA TIMUR	27.450.900.00	0.00	27.450.900.00	0
13	KALIMANTAN BARAT	44.139.853.23	0.00	44.139.853.23	0
14	KALIMANTAN TENGAH	0.00	0.00	0.00	ERR
15	KALIMANTAN SELATAN	552.000.00	552.000.00	0.00	100
16	KALIMANTAN TIMUR	765.000.00	765.000.00	0.00	100
17	SULAWESI UTARA	22.303.861.78	0.00	22.303.861.78	0
18	SULAWESI TENGAH	496.008.00	0.00	496.008.00	0
19	SULAWESI SELATAN	1.658.000.00	0.00	1.658.000.00	0
20	SULAWESI TENGGARA	1.350.000.00	450.000.00	900.000.00	33
21	MALUKU	31.441.600.00	29.171.600.00	2.270.000.00	93
22	BALI	1.345.464.00	300.000.00	1.045.464.00	22
23	NUSA TENGGARA BARAT				
24	NUSA TENGGARA TIMUR	9.224.235.00	3.538.650.00	5.685.585.00	38
25	IRIAN JAYA	11.387.903.36	5.477.800.00	6.110.103.36	47
26	BENGKULU	3.475.152.00	2.825.152.00	650.000.00	81
27	TIMOR TIMUR				
28	PUSAT	39.782.070.00	872.070.00	38.910.000.00	2
	J U M L A H	378.584.968.45	79.426.261.08	299.158.707.37	21

KERUGIAN NEGARA
HASIL PEMERIKSAAN BPKP TAHUN 1996/1997
DISUSUN MENURUT PROPINSI

PROPINSI	LHP	01	02	SETOR	SISA
1. DI. ACEH	64	35,469,288.36	9,423,222.64	24,678,645.36	20,213,865.64
2. SUMATERA UTARA	30	37,151,867.00	2,815,200.00	33,807,461.00	6,159,606.00
3. SUMATERA BARAT	34	73,952,460.75	4,836,000.00	12,032,626.75	66,755,834.00
4. R I A U	17	4,389,906.00	2,583,644.59	6,973,550.59	0.00
5. J A M B I	9	0.00	3,061,625.00	1,358,000.00	1,703,625.00
6. BENGKULU	15	24,782,921.00	20,926,784.00	26,297,852.00	19,411,853.00
7. SUMATERA SELATAN	9	62,139,451.46	253,588.20	15,720,510.29	46,672,529.37
8. LAMPUNG	19	6,524,912.26	705,939.88	4,948,523.14	2,282,329.00
9. PUSAT	9	6,180,610.00	1,386,560.00	0.00	7,567,170.00
10. DKI JAKARTA	34	34,617,910.00	194,853,503.36	36,931,299.00	192,540,114.36
11. JAWA BARAT	26	92,707,591.89	5,231,173.00	6,649,333.00	91,289,431.89
12. JAWA TENGAH	46	7,851,789.90	195,949,094.20	82,588,586.00	121,212,298.10
13. DI. YOGYAKARTA	7	0.00	1,461,600.00	1,461,600.00	0.00
14. JAWA TIMUR	15	8,607,339.40	3,864,495.00	12,471,834.40	0.00
15. KALIMANTAN SELATAN	16	82,776,571.00	0.00	230,450.00	82,546,121.00
16. KALIMANTAN TIMUR	7	77,816,000.00	3,354,722.80	2,606,102.80	78,564,620.00
17. KALIMANTAN BARAT	9	2,319,000.00	10,706,218.80	5,284,618.00	7,740,600.80
18. KALIMANTAN TENGAH	13	5,414,231.63	48,809,250.59	4,080,276.63	50,143,205.59
19. SULAWESI UTARA	16	12,655,750.00	154,300.00	5,677,750.00	7,132,300.00
20. SULAWESI TENGAH	10	6,082,230.10	13,173,244.15	19,255,474.25	0.00
21. SULAWESI TENGGARA	9	25,306,554.68	4,000,260.00	0.00	29,306,814.68
22. SULAWESI SELATAN	28	11,784,622.30	225,098,102.00	4,915,891.30	231,966,833.00
23. B A L I	4	32,503,195.00	0.00	4,098,195.00	28,405,000.00
24. MALUKU	12	16,338,645.83	0.00	9,821,700.00	6,516,945.83
25. NUSA TENGGARA BARAT	8	32,656,215.00	6,059,034.00	9,718,651.00	28,996,598.00
26. NUSA TENGGARA TIMUR	15	50,830,769.00	4,267,576.00	21,803,342.00	33,295,003.00
27. IRIAN JAYA	5	7,846,313.00	17,978,740.00	14,952,461.00	10,872,592.00
28. TIMOR - TIMUR	0	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH SELURUH	486	758,706,145.56	780,953,878.21	368,364,733.51	1,171,295,290.26

KERUGIAN NEGARA
HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA TAHUN 1996/1997
MENURUT PROPINSI

NO.	PROPINSI	KERUGIAN NEGARA	SETOR	SISA
1	DI. ACEH			
2	SUMATERA UTARA			
3	SUMATERA BARAT			
4	RIAU			
5	JAMBI			
6	BENGKULU			
7	SUMATERA SELATAN			
8	LAMPUNG			
9	PUSAT	20,785,841.00	2,282,353.00	18,503,488.00
10	DKI JAKARTA			
11	JAWA BARAT			
12	JAWA TENGAH			
13	DI. YOGYAKARTA			
14	JAWA TIMUR			
15	KALIMANTAN SELATAN			
16	KALIMANTAN TIMUR			
17	KALIMANTAN BARAT			
18	KALIMANTAN TENGAH			
19	SULAWESI UTARA			
20	SULAWESI TENGAH			
21	SULAWESI TENGGARA			
22	SULAWESI SELATAN			
23	BALI			
24	MALUKU			
25	NUSA TENGGARA BARAT			
26	NUSA TENGGARA TIMUR			
27	IRIAN JAYA			
28	TIMOR - TIMUR			
	JUMLAH :	20,785,841.00	2,282,353.00	18,503,488.00

REKAPITULASI KERUGIAN NEGARA DAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN ITJEN TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997
MENURUT : UNIT UTAMA

NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH KERUGIAN NEGARA	PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA	S I S A KERUGIAN NEGARA	%
1	SEKRETARIAT JENDERAL	189.704.240,05	22.477.280,00	167.226.960,05	12
2	DITJEN BINKESMAS	7.322.147,40	5.778.646,00	1.543.501,40	79
3	DITJEN YANMEDIK	171.829.365,00	46.264.583,08	125.564.781,92	27
4	DITJEN P2M & PLP	9.729.216,00	4.905.752,00	4.823.464,00	50
5	DITJEN POM	0,00	0,00	0,00	
6	BADAN LITBANGKES	0,00	0,00	0,00	
J U M L A H		378.584.968,45	79.426.261,08	299.158.707,37	21

KERUGIAN NEGARA
HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA TAHUN 1996/1997
MENURUT : UNIT UTAMA

U R A I A N	KERUGIAN NEGARA	SETOR	SISA
SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN YANMEDIK DITJEN BINKESMAS DITJEN PPM & PLP DITJEN PO M LITBANGKES	1,259,353.00 19,526,488.00	1,072,000.00 1,210,353.00	187,353.00 18,316,135.00
J U M L A H :	20,785,841.00	2,282,353.00	18,503,488.00

KERUGIAN NEGARA
HASIL PEMERIKSAAN BPKP TAHUN 1996/1997
DISUSUN MENURUT UNIT UTAMA

UNIT UTAMA	01	02	SETOR	SISA
SEKRETARIAT JENDERAL	194,469,906.53	156,765,214.64	113,796,493.53	237,438,627.64
INSPEKTORAT JENDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DITJEN BINKESMAS	65,101,973.83	4,975,310.00	7,759,404.00	62,317,879.83
DITJEN YANMEDIK	401,817,852.30	257,127,712.36	101,448,580.56	557,496,984.10
DITJEN P2M & PLP	16,819,899.00	26,370,563.19	36,717,637.39	6,472,824.80
DITJEN POM	8,429,336.61	1,558,359.88	6,086,521.49	3,901,175.00
BADAN LITBANGKES	16,821,000.00	0.00	0.00	16,821,000.00
BUMN	55,246,177.29	334,156,718.14	102,556,096.54	286,846,798.89
JUMLAH	758,706,145.56	780,953,878.21	368,364,733.51	1,171,295,290.26

KERUGIAN NEGARA
HASIL PEMERIKSAAN BPKP TAHUN 1996/1997
DISUSUN MENURUT PROGRAM

PROGRAM	LHP	KERUGIAN NEGARA			
		01	02	SETOR	SISA
1. PENYULUHAN KESEHATAN	7	1,200,000.00	180,000.00	1,200,000.00	180,000.00
2. PELAYANAN KES. MASYARAKAT	23	63,901,973.83	3,123,110.00	4,707,204.00	62,317,879.83
3. PELAYANAN KES. RUJUKAN & RS	97	402,624,403.90	257,933,405.36	101,017,587.16	559,540,222.10
4. PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR	25	5,006,044.00	25,559,313.19	25,725,132.39	4,840,224.80
5. PERBAIKAN GIZI	12	2,960,849.00	2,139,696.00	5,100,545.00	0.00
6. PENGAWASAN OBAT MAKANAN	31	8,429,336.61	1,558,359.88	6,086,521.49	3,901,175.00
7. PENGOBATAN TRADISIONAL	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8. PENYEDIAAN & PENGELOLAAN AIR BERSIH	4	1,882,000.00	0.00	1,882,000.00	0.00
9. KESEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN	8	9,931,855.00	811,250.00	9,110,505.00	1,632,600.00
10. PENDIDIKAN KEDINASAN	58	97,594,783.00	72,159,981.00	73,729,013.00	96,025,751.00
11. DIKLAT APARATUR NEGARA	16	15,095,773.00	2,040,000.00	7,064,035.00	10,071,738.00
12. LITBANG KESEHATAN	1	16,821,000.00	0.00	0.00	16,821,000.00
13. PEMBINAAN PEMUDA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14. PERANAN WANITA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
15. PENGEMB. INFORMASI KES.	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16. PENGEMB. HUKUM KESEHATAN	0	0.00	0.00	0.00	0.00
17. PENINGK. PRASARANA & SARANA	10	1,436,936.40	57,530,370.00	1,436,936.40	57,530,370.00
18. PENINGKATAN EFISIENSI	139	76,575,013.53	23,761,674.64	28,749,157.53	71,587,530.64
19. PENDAYAGUNAAN SISTEM & LAKWAS	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20. BUMN	55	55,246,177.29	334,156,718.14	102,556,096.54	286,846,798.89
JUMLAH	486	758,706,145.56	780,953,878.21	368,364,733.51	1,171,295,290.26

KERUGIAN NEGARA
HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA TAHUN 1996/1997
MENURUT PROGRAM

PRO GRAM	U R A I A N	KERUGIAN NEGARA	SETOR	SISA
1	PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT	19,526,488.00	1,210,353.00	18,316,135.00
2	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT			
3	KESEHATAN RUJUKAN RS			
4	PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR			
5	PERBAIKAN GIZI			
6	P O M			
7	PENGobatan TRADISIONAL	1,259,353.00	1,072,000.00	187,353.00
8	P P A B			
9	PENYEKATAN LINGKUNGAN & PEMUKIMAN			
10	PENDIDIKAN KEDINASAN			
11	PENDIDIKAN & LATIHAN PEGAWAI			
12	PENELITIAN & PENGEMBANGAN			
13	PENGEMBANGAN GENERASI MUDA			
14	PERANAN WANITA			
15	SISTEM INFORMASI KESEHATAN			
16	PENGEMBANGAN HUKUM KESEHATAN			
17	SARANA & PRASARANA APARATUR			
18	EFISIENSI APARATUR NEGARA			
19	PENGEMBANGAN SISTEM WASLAK			
	J U M L A H :	20,785,841.00	2,282,353.00	18,503,488.00

HASIL PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG
PELAKSANAAN ANGGARAN DEPARTEMEN KESEHATAN (RUTIN NON BEL. PEGAWAI + PROYEK + BLN + OPRS)
TAHUN 1996/1997

(Pelaksanaan Anggaran dalam Rupiah)

PROGRAM	OBJEK / SUB OBJEK		PELAKSANAAN ANGGARAN DEPARTEMEN KESEHATAN				
	JUMLAH	TERPANTAU	ALOKASI	TERPANTAU	REALISASI	%	SISA
<u>I PROGRAM POKOK</u>	<u>1.499</u>	<u>1.359</u>	<u>931.943.970.000</u>	<u>900.637.364.000</u>	<u>726.489.798.141</u>	<u>80,66</u>	<u>174.147.565.859</u>
1. PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT	71	71	28.898.807.000	28.898.807.000	18.667.757.889	64,60	10.231.049.111
2. PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	486	465	248.222.611.000	227.641.580.000	158.068.480.098	69,44	69.573.099.902
3. PELAYANAN KES. RUJUKAN & RS	670	565	380.219.589.000	372.467.193.000	325.537.656.407	87,40	46.929.536.593
4. PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENYAKIT	114	101	206.673.128.000	203.992.003.000	175.676.941.851	86,12	28.315.061.149
5. PERBAIKAN GIZI	35	35	20.343.040.000	20.343.040.000	18.644.607.289	91,65	1.698.432.711
6. PENGAWASAN OBAT, MAKANAN	117	116	46.306.154.000	46.014.100.000	28.619.961.957	62,20	17.394.138.043
7. PEMBINAAN PENGOBATAN TRADISIONIL	6	6	1.280.641.000	1.280.641.000	1.274.392.650	99,51	6.248.350
<u>II PROGRAM PENUNJANG</u>	<u>1.286</u>	<u>1.128</u>	<u>225.965.220.000</u>	<u>219.462.789.000</u>	<u>179.531.062.458</u>	<u>81,80</u>	<u>39.931.726.542</u>
8. PENGAWASAN & PENYEDIAAN AIR BERSIH	29	29	11.360.438.000	11.360.438.000	9.401.637.304	82,76	1.958.800.696
9. PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN	66	65	28.351.646.000	28.116.563.000	20.100.281.505	71,49	8.016.281.495
10. PENDIDIKAN KEDINASAN	376	352	106.098.786.000	101.956.357.000	87.895.791.240	86,21	14.060.565.760
11. PENDIDIKAN & PELATIHAN PEGAWAI	76	75	17.337.713.000	17.253.805.000	15.255.472.149	88,42	1.998.332.851
12. PENINGK & LIT ILMU PENGETAHUAN TERAPAN	17	17	9.175.780.000	9.175.780.000	8.934.451.888	97,37	241.328.112
13. PEMBINAAN PEMUDA	1	1	508.883.000	508.883.000	507.490.700	99,73	1.392.300
14. PERANAN WANITA	28	28	996.827.000	996.827.000	961.272.895	96,43	35.554.105
15. SISTEM INFORMASI KESEHATAN	45	43	10.011.640.000	9.629.033.000	4.761.824.773	49,45	4.867.208.227
16. PENGEMBANGAN HUKUM KESEHATAN	1	1	553.118.000	553.118.000	510.021.755	92,21	43.096.245
17. PENINGKATAN SARANA & PRASARANA	19	19	4.069.364.000	4.069.364.000	3.999.147.998	98,27	70.216.002
18. PENINGKATAN EFISIENSI APARATUR NEGARA	627	497	33.932.364.000	32.273.960.000	23.709.649.418	73,46	8.564.310.582
19. PENDAYAGUNAAN SISTEM & WASLAK	1	1	3.568.661.000	3.568.661.000	3.494.020.833	97,91	74.640.167
JUMLAH	2.785	2.487	1.157.909.190.000	1.120.100.153.000	906.020.860.599	80,89	214.079.292.401

Catatan : % Realisasi dari Anggaran yang Terpantau)

**HASIL PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG
PELAKSANAAN ANGGARAN RUTIN DEPARTEMEN KESEHATAN
TH. 1996/1997**

(Pelaksanaan Anggaran dalam Rupiah)

PROGRAM	SATUAN KERJA		ANGGARAN KEBUDIDHAJATAN					ANGGARAN TANPA BELANJA PEGAWAI				
	JUMLAH	TERPANTAU	ALOKASI	TERPANTAU	REALISASI	%	SSSA	ALOKASI	TERPANTAU	REALISASI	%	SSSA
I. PROGRAM POKOK	200	188	310.287.973.000	305.271.771.000	310.867.986.676	101,08	(12.580.315.676)	144.590.251.000	143.633.981.000	139.878.727.627	96,83	4.555.253.773
1. PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT	1	1	1.000.310.000	1.000.310.000	1.027.219.165	102,69	(16.909.165)	655.730.000	655.730.000	655.219.697	99,92	510.303
2. PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	29	28	12.151.137.000	12.141.960.000	12.236.455.596	100,78	(94.495.596)	6.442.793.000	6.442.793.000	6.262.780.991	97,21	180.012.009
3. PELAYANAN KES. RUJUKAN & RS	93	93	256.619.968.000	256.619.968.000	269.786.198.610	105,13	(13.166.230.610)	118.558.977.000	118.558.977.000	115.547.954.260	97,46	3.011.022.740
4. PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENYAKIT	48	38	10.069.845.000	18.863.624.000	18.226.535.946	96,63	637.088.054	10.764.138.000	10.099.922.000	9.170.266.527	90,80	929.655.473
5. PERBAIKAN GIZI	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6. PENGAWASAN OBAT, MAKANAN	19	28	20.441.663.000	19.645.909.000	19.585.877.349	99,69	60.231.651	8.168.613.000	7.876.559.000	7.442.506.152	94,49	434.052.848
7. PEMBINAAN PENGOBATAN TRADISIONIL	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
II. PROGRAM PENUNJANG	858	865	419.189.297.000	402.117.064.000	414.415.878.792	101,53	(34.208.966.772)	80.616.251.000	76.494.006.000	73.451.332.715	96,01	1.042.673.285
8. PENGAWASAN & PENYEDIAAN AIR BERSIH	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9. PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN	3	3	2.783.070.000	2.783.070.000	2.868.478.038	103,07	(85.408.038)	2.113.886.000	2.113.886.000	2.090.225.121	98,88	23.660.879
10. PENDIDIKAN KEDINASAN	178	165	72.394.683.000	68.738.876.000	66.245.612.036	96,37	2.495.365.964	44.733.107.000	42.216.172.000	40.558.687.211	96,02	1.679.484.789
11. PENDIDIKAN & PELATIHAN PEGAWAI	31	30	10.956.760.000	10.827.352.000	9.613.811.894	88,79	1.213.540.106	5.538.464.000	5.454.556.000	4.913.704.407	90,08	540.851.593
12. PENINGK & LIT ILMU PENGETAHUAN TERAPAN	9	9	1.771.954.000	1.771.954.000	1.660.295.114	93,73	111.558.886	3.951.534.000	3.951.534.000	3.872.671.287	98,00	78.862.713
13. PEMBINAAN PEMUDA	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14. PERANAN WANITA	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15. SISTEM INFORMASI KESEHATAN	1	1	973.389.000	973.389.000	939.410.000	96,51	33.979.000	584.464.000	584.464.000	528.989.000	90,51	55.475.000
16. PENGEMBANGAN HUKUM KESEHATAN	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17. PENINGKATAN SARANA & PRASARANA	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
18. PENINGKATAN EFISIENSI APARATUR NEGARA	585	456	328.744.347.000	305.457.167.000	343.556.808.635	112,47	(38.099.641.635)	20.126.137.000	18.602.733.000	18.013.034.856	96,83	589.698.144
19. PENDAYAGUNAAN SISTEM & WASLAK	1	1	4.565.094.000	4.565.094.000	4.543.454.675	99,53	21.639.325	3.568.661.000	3.568.661.000	3.494.020.833	97,91	74.640.167
JUMLAH	1.008	853	739.477.270.000	710.388.775.000	757.288.057.068	106,60	(46.899.182.968)	225.206.504.000	220.127.987.000	212.530.060.342	96,55	7.597.926.658

Catatan : % Realisasi dari alokasi yang terpantau

HASIL PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG
PELAKSANAAN ANGGARAN PROYEK PEMBANGUNAN (APBN) DEPARTEMEN KESEHATAN
TAHUN 1996/1997

(Pelaksanaan Anggaran dalam Rupiah)

PROGRAM	PROYEK/BAG. PROYEK		PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN (APBN)				
	JUMLAH	TERPANTAU	ALOKASI	TERPANTAU	REALISASI	%	SISA
<u>I PROGRAM POKOK</u>	<u>694</u>	<u>686</u>	<u>425.598.958.000</u>	<u>422.652.200.000</u>	<u>400.424.891.893</u>	<u>94,74</u>	<u>22.277.308.107</u>
1. PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT	59	59	12.654.340.000	12.654.340.000	11.397.603.679	90,07	1.256.736.321
2. PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	346	338	114.014.773.000	111.068.015.000	101.316.400.773	91,22	9.751.614.227
3. PELAYANAN KES. RUJUKAN & RS	157	157	141.525.697.000	141.525.697.000	136.147.232.589	96,20	5.378.464.411
4. PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENYAKIT	34	34	123.400.918.000	123.400.918.000	118.708.535.681	96,20	4.692.382.319
5. PERBAIKAN GIZI	29	29	18.127.665.000	18.127.665.000	17.459.836.286	96,32	667.828.714
6. PENGAWASAN OBAT, MAKANAN	63	63	14.594.924.000	14.594.924.000	14.120.890.235	96,75	474.033.765
7. PEMBINAAN PENGOBATAN TRADISIONIL	6	6	1.280.641.000	1.280.641.000	1.274.392.650	99,51	6.248.350
<u>II PROGRAM PENUNJANG</u>	<u>379</u>	<u>371</u>	<u>80.468.497.000</u>	<u>79.621.729.000</u>	<u>73.999.756.717</u>	<u>92,94</u>	<u>5.621.972.283</u>
8. PENGAWASAN & PENYEDIAAN AIR BERSIH	28	28	7.218.438.000	7.218.438.000	6.737.532.344	93,34	480.905.656
9. PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN	32	32	5.296.858.000	5.296.858.000	4.999.274.810	94,38	297.583.190
10. PENDIDIKAN KEDINASAN	165	159	42.332.817.000	41.690.127.000	38.411.056.775	92,13	3.279.070.225
11. PENDIDIKAN & PELATIHAN PEGAWAI	31	31	7.677.449.000	7.677.449.000	7.298.810.581	95,07	378.638.419
12. PENINGK & LIT ILMU PENGETAHUAN TERAPAN	8	8	5.224.246.000	5.224.246.000	5.061.780.601	96,89	162.465.399
13. PEMBINAAN PEMUDA	1	1	508.883.000	508.883.000	507.490.700	99,73	1.392.300
14. PERANAN WANITA	28	28	996.827.000	996.827.000	961.272.895	96,43	35.554.105
15. SISTEM INFORMASI KESEHATAN	34	33	2.372.452.000	2.303.374.000	2.193.011.038	95,21	110.362.962
16. PENGEMBANGAN HUKUM KESEHATAN	1	1	553.118.000	553.118.000	510.021.755	92,21	43.096.245
17. PENINGKATAN SARANA & PRASARANA	18	18	3.697.446.000	3.697.446.000	3.628.779.062	98,14	68.666.938
18. PENINGKATAN EFISIENSI APARATUR NEGARA	33	32	4.589.963.000	4.454.963.000	3.690.726.156	82,85	764.236.844
19. PENDAYAGUNAAN SISTEM & WASLAK	0	0	0	0	0	0,00	0
JUMLAH	1.073	1.057	506.067.455.000	502.273.929.000	474.424.648.610	94,46	27.849.280.390

Catatan : % Realisasi dari Anggaran yang Terpantau

HASIL PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG
PELAKSANAAN ANGGARAN PROYEK O P R S DEPARTEMEN KESEHATAN
TAHUN 1996/1997

(Pelaksanaan Anggaran dalam Rupiah)

PROGRAM	PROYEK OPRS		PELAKSANAAN ANGGARAN O P R S				
	JUMLAH	TERPANTAU	ALOKASI	TERPANTAU	REALISASI	%	SISA
1. PELAYANAN KES. RUJUKAN & RS	407	302	58.756.019.000	51.003.623.000	50.761.428.977	99,53	242.194.023

Catatan : % Realisasi dari Anggaran yang Terpantau

HASIL PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG
PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN LUAR NEGERI DEPARTEMEN KESEHATAN
TAHUN 1996/1997

(Pelaksanaan Anggaran dalam Rupiah)

PROGRAM	PROYEK/BAG. PROYEK		PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN LUAR NEGERI				
	JUMLAH	TERPANTAU	ALOKASI	TERPANTAU	REALISASI	%	SISA
<u>I PROGRAM POKOK</u>	<u>198</u>	<u>183</u>	<u>302.998.742.000</u>	<u>283.347.560.000</u>	<u>136.224.749.644</u>	<u>48,08</u>	<u>147.122.810.356</u>
1. PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT	11	11	15.588.737.000	15.588.737.000	6.514.934.513	42,43	8.973.802.487
2. PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	111	99	127.765.045.000	110.130.772.000	50.489.298.334	45,84	59.641.473.666
3. PELAYANAN KES. RUJUKAN & RS	13	13	61.378.896.000	61.378.896.000	23.081.040.581	37,60	38.297.855.419
4. PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENYAKIT	32	29	72.508.072.000	70.491.163.000	47.798.139.643	67,81	22.693.023.357
5. PERBAIKAN GIZI	6	6	2.215.375.000	2.215.375.000	1.184.771.003	53,48	1.030.603.997
6. PENGAWASAN OBAT, MAKANAN	25	25	23.542.617.000	23.542.617.000	7.056.565.570	29,97	16.486.051.430
7. PEMBINAAN PENGOBATAN TRADISIONIL	0	0	0	0	0	0,00	0
<u>II PROGRAM PENUNJANG</u>	<u>99</u>	<u>92</u>	<u>64.880.470.000</u>	<u>63.347.054.000</u>	<u>32.079.973.026</u>	<u>50,64</u>	<u>31.267.080.974</u>
8. PENGAWASAN & PENYEDIAAN AIR BERSIH	1	1	4.142.000.000	4.142.000.000	2.664.104.960	64,32	1.477.895.040
9. PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN	31	30	20.940.902.000	20.705.819.000	13.010.781.574	62,84	7.695.037.426
10. PENDIDIKAN KEDINASAN	33	28	19.032.862.000	18.048.058.000	8.946.047.254	49,57	9.102.010.746
11. PENDIDIKAN & PELATIHAN PEGAWAI	14	14	4.121.800.000	4.121.800.000	3.042.957.161	73,83	1.078.842.839
12. PENINGK & LIT ILMU PENGETAHUAN TERAPAN	0	0	0	0	0	0,00	0
13. PEMBINAAN PEMUDA	0	0	0	0	0	0,00	0
14. PERANAN WANITA	0	0	0	0	0	0,00	0
15. SISTEM INFORMASI KESEHATAN	10	9	7.054.724.000	6.741.195.000	2.039.824.735	30,26	4.701.370.265
16. PENGEMBANGAN HUKUM KESEHATAN	0	0	0	0	0	0,00	0
17. PENINGKATAN SARANA & PRASARANA	1	1	371.918.000	371.918.000	370.368.936	99,58	1.549.064
18. PENINGKATAN EFISIENSI APARATUR NEGARA	9	9	9.216.264.000	9.216.264.000	2.005.888.406	21,76	7.210.375.594
19. PENDAYAGUNAAN SISTEM & WASLAK	0	0	0	0	0	0,00	0
JUMLAH	297	275	367.879.212.000	346.694.614.000	168.304.722.670	48,55	178.389.891.330

Catatan : % Realisasi dari Anggaran yang Terpantau